

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF:  
“STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



**Oleh:**

**Besty Anindya Nur Azni**

**NIM. 10401241031**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF:  
*STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN PARTAI  
GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA*” ini telah disetujui pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 23 September 2014

Pembimbing,

Nasiwan, M.Si.

NIP. 19650417 200212 1 001

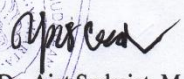
## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF: “STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 01 Oktober 2014 dan telah dinyatakan lulus.

### DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Sri Hartini, M.Hum	Ketua Penguji		15/10/2014
2. Chandra Dewi P.,LL.M	Sekretaris Penguji		14/10/2014
3. Dr. Sunarso, M.Si	Penguji Utama		13/10/2014
4. Nasiwan, M.Si	Penguji Pendamping		16/10/2014

Yogyakarta, 1<sup>b</sup> Oktober 2014  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,

  
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag  
NIP. 19620321 198903 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Besty Anindya Nur Azni

NIM : 10401241031

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "POLA REKRUTMEN CALEG: *STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*" ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat seperti karya saya ini yang diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya tulis ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 23 September 2014

Yang menyatakan,



Besty Anindya Nur Azni

NIM. 10401241008

## **MOTTO**

**Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.**

**(Thomas Alva Edison)**

**Dan barang siapa menjalani akan suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (H.R. Muslim)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*“Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu dan bapak saya yang siang malam tak pernah luput menyelipkan nama anak-anaknya disela-sela doanya kepada Allah SWT”*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas segala rahmat dan ridho yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi. Skripsi yang berjudul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: *“Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta”* ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Skripsi ini menyajikan berbagai informasi yang terkait dengan pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu legislatif tahun 2014. Penyusunan skripsi ini membutuhkan proses yang cukup lama dan berat, namun hal tersebut seolah sirna saat tulisan ini terselesaikan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang memberikan berbagai fasilitas selama proses perkuliahan.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi terkait penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Samsuri, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Nasiwan, M. Si., selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan motivasi dan berbagai pengarahan untuk penyelesaian skripsi.
5. Ibu Sri Hartini, M. Hum., selaku penasehat akademik dan ketua penguji yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan member masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Sunarso, M.Si selaku Penguji Utama yang telah memberikan masukan kepada penulis demi kelayakan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat.
8. Bapak Fani Satria selaku sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) PAN DIY, yang telah memberikan banyak informasi bermanfaat untuk skripsi ini.
9. Bapak Paryanto, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DIY yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Guntur Yudianto, selaku Kepala Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DIY yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Nita selaku Anggota Badan Seleksi Partai Gerindra DIY yang telah memberikan informasi dan bantuan untuk penulisan skripsi ini.
12. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Rias Mitha dan Sastika Nidya, selaku kakak dan adik penulis yang selama ini mengalah jika laptopnya penulis gunakan.



14. Eyin, Anin, Puji, Hanum, Wilda, Linggar, Yayas, teman-teman yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk terus menjadi lebih baik.
15. Rendi, Puput, Gafar, Wayan, Theo, David, Wayan, Adi, Afif selaku teman-teman penulis yang memberikan bantuannya saat seminar proposal.
16. Teman-teman PKnH A 2010 yang luar biasa hebatnya, semangatnya, yang selama ini menemani hari-hari penulis sewaktu kuliah.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan, dukungan, semangat, nasehat, doa, kritik, dan saran yang telah memberikan kepada penulis, semoga amal baik semua pihak senantiasa mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, September 2014

Penulis,

Besty Anindya Nur Azni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Batasan Istilah.....	9
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Rekrutmen Politik	
1. Pengertian dan Jenis Rekrutmen Politik.....	11
2. Kaderisasi dan Regenerasi.....	15
3. Kaderisasi Sebagai Proses Penempatan.....	17
B. Tinjauan Tentang Partai Politik	
1. Pengertian Partai Politik.....	19
2. Pembentukan Partai Politik.....	23
3. Fungsi Partai Politik.....	25
4. Hak dan Kewajiban Partai Politik.....	31
5. Tipologi Partai Politik.....	32
C. Tinjauan tentang Pendidikan Politik.....	40
D. Tinjauan Tentang Demokrasi Prosedural.....	43
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	49
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	52

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi PAN dan Partai Gerindra di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	55
1. Asas dan <i>Platform</i> PAN.....	56
2. Visi dan Misi PAN.....	57
3. Fungsi Asas dan Platform Bagi Kader PAN.....	58
4. Visi misi Partai Gerindra.....	62
B. Perbedaan Pola Rekrutmen Caleg Antara Partai Gerindra dan PAN	
1. Rekrutmen Calon Anggota DPRD PAN DIY.....	64
2. Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Gerindra DIY..	75
3. Perbandingan Pola Rekrutmen Kedua Partai.....	80
C. Upaya Partai Gerindra dan PAN Untuk Meningkatkan Kualitas Caleg DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	85
1. Kaderisasi PAN.....	86
2. Kaderisasi Partai Gerindra.....	91
3. Pendidikan Politik Untuk Masyarakat.....	93
D. Kesesuaian Pola Rekrutmen Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra Dengan Demokrasi Prosedural .....	96
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1:</b> Tipologi Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian.....	39
<b>Tabel 2:</b> Perbedaan pola rekrutmen Caleg DPRD Provinsi antara DPD Gerindra dan DPW PAN DIY Tahun 2014.....	80
<b>Tabel 3:</b> Persamaan Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Antara DPD Gerindra dan DPW PAN DIY Tahun 2014.....	82
<b>Tabel 4:</b> Upaya Partai Gerindra dan PAN untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatif.....	95

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
<b><i>Lampiran 1:</i></b> Daftar calon anggota DPRD Provinsi DIY Partai	
Gerindra Tahun 2014-2019.....	109
<b><i>Lampiran 2:</i></b> Daftar calon anggota DPRD Provinsi DIY Partai	
Amanat Nasional Tahun 2014-2019.....	115
<b><i>Lampiran 3:</i></b> Daftar anggota DPRD (Provinsi) Terpilih Partai	
Amanat Nasional Tahun 2014-2019.....	121
<b><i>Lampiran 3 (Lanjutan):</i></b> Daftar anggota DPRD (Provinsi) Terpilih	
Partai Gerindra Tahun 2014-2019.....	122
<b><i>Lampiran 4:</i></b> Surat-Surat Penelitian.....	123

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF: “STUDI  
KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN PARTAI  
GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA”**

**Oleh:  
Besty Anindya Nur Azni**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu untuk mengetahui upaya PAN dan partai Gerindra untuk meningkatkan kualitas caleg yang mereka usung, dan kesesuaian pola rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dan PAN dengan demokrasi prosedural.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*, yakni dengan kriteria orang yang terlibat langsung dengan proses rekrutmen partai Gerindra dan PAN. Sebagai subjek penelitian ini yaitu ketua kantor DPD Gerindra DIY, sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Wilayah PAN DIY, anggota Badan Seleksi Partai Gerindra DIY, dan wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN DIY. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Teknik analisis data secara induktif, meliputi reduksi data, kategorisasi, display data dan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada perbedaan pola rekrutmen PAN dan Gerindra tingkat Provinsi DIY antara lain: a) sosialisasi pendaftaran caleg PAN masih tergolong sempit, sedangkan Gerindra sudah tergolong luas, b) seleksi bacaleg PAN menggunakan teknik penilaian melalui *paper* yang berisi visi misi bacaleg, Gerindra menggunakan penilaian dengan test psikologi, kegerindraan, dan wawancara umum tentang ketugasan dewan, c) posisi caleg perempuan di PAN memiliki prioritas berada di nomor urut satu jika ia didukung oleh perannya sebagai kader partai, jika tidak didukung maka tetap berdasarkan skoring. Pada partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki, d) PAN hanya merekrut bacaleg kader, sedangkan partai Gerindra merekrut bacaleg kader dan non-kader. 2) upaya PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas calegnya adalah dengan kaderisasi untuk anggotanya dan berbagai program terkait pendidikan politik untuk masyarakat luas, 3) Secara umum pola rekrutmen yang dilakukan PAN dan Gerindra sudah sesuai dengan demokrasi prosedural, hanya saja terdapat perbedaan dalam implementasinya.

Kata kunci: *rekrutmen, caleg, PAN, Gerindra*.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antarpolitisi dan antarpantai politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*politycal society*) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (*economic society*) (Siti Zuhro, 2009: 8).

Diberlakukannya sistem pemilihan langsung untuk pemilihan presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menimbulkan harapan besar bagi rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan jauh dari nepotisme yang pernah marak terjadi di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya, Pemilu secara langsung tidak sepenuhnya dapat menjamin calon-calon legislatif yang dipilih benar-benar memiliki kualitas baik sebagai anggota dewan. Dalam hal ini, partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam merekrut calon-calon anggota legislatif yang benar-benar tepat karena proses perekrutan paling awal ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Proses pengajuan calon-calon legislatif pun dimulai dari proses rekrutmen partai baik rekrutmen secara terbuka maupun rekrutmen secara tertutup.

Di Indonesia telah dibentuk beberapa undang-undang partai politik, yang terbaru adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2011 yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan adanya undang-undang kepartaian tersebut, tentu lebih menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri.

Menurut Cheppy Haricahyono, berbicara partai politik setidaknya menyangkut tiga pihak. Pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatis, dan lain sebagainya (Cheppy Haricahyono, 1991: 191).

Dari penjelasan di atas maka diketahui bahwa masing-masing partai politik memiliki dan menerapkan pola rekrutmen yang berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para calon anggota legislatif. Apabila masing-



masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi kualitas anggota dewan khususnya dalam proses rekrutmennya, maka dapat dipastikan partai akan benar-benar teliti dan melakukan banyak pertimbangan terhadap kualitas calon legislatif yang mereka hendak ajukan karena dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan yang juga turut menyeleksi sifatnya hanya sekunder saja, jika persyaratan umum sudah dipenuhi calon maka Komisi Pemilihan Umum tidak ada alasan untuk tidak meloloskannya.

Di lingkup Yogyakarta, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai disorot banyak pihak. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta belum terlalu baik. Dalam hal rekomendasi lembaga eksekutif, DPRD DIY mendapatkan skor paling buruk. Keadaan ini serasa ironis dengan angka kemiskinan di Yogyakarta yang masih tergolong tinggi yakni mencapai 15% di tahun 2013-2014 ini. Kota yang paling cepat melakukan pengentasan kemiskinan adalah DKI Jakarta dengan berbagai program yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dan inisiatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengentaskan kemiskinan masih minim dilakukan, banyak jalan desa di berbagai daerah masih rusak dan tidak mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: (<http://www.harianjogja.com/baca/2014/06/26/kinerja-anggota-dprd-masa-transisi-begini-kinerja-anggota-dprd-diy-515663> )

Dari survey rendahnya upaya dan inisiatif DPRD Provinsi DIY tersebut, tentu masyarakat wajar apabila mempertanyakan bagaimana upaya partai politik sebagai organisasi yang memiliki fungsi rekrutmen politik untuk memperbaiki kualitas caleg yang hendak mereka usung. Partai politik jelas memiliki peranan yang besar terhadap terpilihnya anggota-anggota DPRD Provinsi DIY yang dinilai kurang kompeten berdasarkan survey BPS.

Demokrasi yang semakin berkembang membuat banyak partai politik baru muncul dengan gagasan dan ide-ide baru mereka. Partai Gerindra sebagai partai yang baru dua kali mengikuti Pemilu pada tahun 2009 dan 2014 dapat dikatakan sukses meraup suara pada pemilu legislatif 2014 ini. Kenaikan suara secara signifikan dapat terlihat pada pemilu tahun 2009 yang hanya memperoleh suara sebesar 4,4% kemudian naik menjadi hampir 12% pada pemilu tahun 2014 ini (Sumber: <http://posbali.com/prabowo-effect-lonjakkan-suara-gerindra-jokowi-terancam/>). Gerindra masuk sebagai golongan tiga partai yang berhasil memperoleh suara lebih dari 10% tentu memiliki strategi tersendiri untuk memenangkan pemilu tahun 2014 ini. Pada pemilu legislatif (pileg) tahun 2014 ini, Gerindra merupakan satu-satunya partai yang mengusung calon anggota legislatif di Dapil DIY dari kalangan artis, yakni dengan mengajukan Riefian Fajarsyah sebagai calon anggota DPR RI. Popularitas yang dimiliki calon yang terkenal dengan nama 'Ifan Seventeen' ini memang sudah tidak diragukan lagi. Popularitas calon legislatif memang sering dimanfaatkan partai politik untuk mendongkrak suara partai, ditambah dengan pola rekrutmen yang terbuka luas bagi

masyarakat turut membuat sebuah partai politik memiliki banyak kader yang berarti berpengaruh juga untuk membuka lebar kemenangan partai dalam Pemilu.

Terkait dengan strategi partai politik yang berupaya mendongkrak suara partai dengan menempatkan caleg artis untuk turut meramaikan Pemilu mewakili partainya, Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai yang mendapat julukan sebagai partai caleg artis karena PAN banyak menempatkan caleg yang berprofesi sebagai artis ditingkat pusat. Berbeda dengan tingkat pusat, di tingkat lokal PAN justru sangat jarang menempatkan caleg artisnya. Menurut hasil wawancara pada Dewan Pimpinan Wilayah PAN DIY, PAN terkadang mengalami kekurangan jumlah caleg untuk tingkat lokalnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada permasalahan terkait dengan rekrutmen caleg PAN di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demokrasi prosedural merupakan demokrasi yang lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan demokrasi substansial karena demokrasi prosedural memiliki tolok ukur tersendiri yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya berbagai masalah yang timbul terkait dengan rekrutmen caleg oleh partai politik, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan pula bagaimana kesesuaian rekrutmen yang dilakukan PAN dan partai Gerindra dengan demokrasi prosedural.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan sebagai berikut :

1. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai kurang inisiatif untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang seharusnya mendapat perhatian khusus, misalkan kemiskinan.
2. Kurangnya upaya partai politik untuk meningkatkan kualitas caleg yang hendak diusung.
3. Popularitas dari caleg artis semata-mata hanya digunakan partai politik untuk mendongkrak suara partai.
4. Di tingkat lokal, PAN terkadang mengalami kekurangan jumlah calon anggota legislatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kesesuaian pola rekrutmen partai Gerindra dan PAN di DIY dengan demokrasi prosedural yang masih dipertanyakan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang timbul sehubungan dengan pola rekrutmen partai politik terhadap calon legislatif yang mereka ajukan, serta keterbatasan yang ada pada peneliti, baik pikiran, tenaga, waktu, dan biaya maka penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui:

1. Pola rekrutmen caleg DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberlakukan partai Gerindra dan PAN dari tahap awal hingga tahap akhir.

2. Upaya yang dilakukan PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas caleg DPRD Provinsi yang diusung.
3. Kesesuaian rekrutmen caleg DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Partai Gerindra dan PAN dengan demokrasi prosedural.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, penelitian ini menitik beratkan pada pola dan tahap rekrutmen caleg DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Gerindra dan PAN terkait dengan usaha mereka menemukan calon wakil rakyat yang memiliki nilai keterpilihan.

Berikut merupakan rumusan masalah terkait dengan penelitian ini:

1. Apakah perbedaan pola rekrutmen antara partai Gerindra dan PAN terhadap calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi?
2. Bagaimana upaya PAN dan partai Gerindra untuk meningkatkan kualitas caleg agar sesuai dengan harapan masyarakat?
3. Apakah pola rekrutmen caleg yang dijalankan PAN dan partai Gerindra sudah sesuai dengan prinsip demokrasi prosedural?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbedaan pola rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi partai Gerindra dan PAN dari tahap awal hingga akhir.

2. Upaya partai Gerindra dengan PAN untuk meningkatkan kualitas para calegnya.
3. Kesesuaian pola rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dan PAN dengan demokrasi prosedural.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam materi tentang partai politik khususnya dalam hal rekrutmen politik. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat praktis.**

###### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan dan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
- 2) Penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di Universitas Negeri Yogyakarta.

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Sebagai salah satu sarana penerapan serta pengembangan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan.

c. Bagi Parpol Gerindra dan PAN

Sebagai pembuktian nyata penerapan demokrasi sekaligus bentuk transparansi partai Gerindra dan PAN kepada masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat sekaligus sebagai pendidikan politik baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dalam kehidupan sehari-hari.

## **G. Pembatasan Istilah**

Untuk meminimalisir dan menghindari kesalah pahaman serta untuk mendapatkan gambaran dan arah yang lebih jelas terhadap permasalahan dalam penelitian ini diperlukan penegasan istilah yang terdapat dalam judul. Untuk itu diperlukan batasan istilah dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pola Rekrutmen

Pola rekrutmen adalah tata cara (proses) pengisian suatu jabatan dalam suatu lembaga. Dalam penelitian ini, yang dimaksud pola rekrutmen adalah pola rekrutmen dalam bidang politik atau biasa disebut rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik (Suharno, 2004: 117). Pola rekrutmen dibagi menjadi dua jenis, yakni pola rekrutmen tertutup dan pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen partai politik di Indonesia

hampir seluruhnya menganut sistem rekrutmen terbuka yang sesuai dengan nilai demokrasi yang diterapkan di banyak negara penganut demokrasi, dalam hal ini Indonesia. Sistem rekrutmen terbuka membuka peluang bagi siapa saja warga negara Indonesia yang hendak menduduki jabatan-jabatan politik untuk selanjutnya menjalankan fungsi dan kepentingan masing-masing.

## 2. Calon Anggota Legislatif (Caleg)

Calon anggota legislatif adalah orang-orang yang dicalonkan oleh partai politik untuk nantinya menduduki kursi kepemimpinan dalam lembaga legislatif. Dalam penelitian ini yang hendak diteliti adalah calon anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan hanya untuk rekrutmen caleg DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Studi Komparasi

Penelitian dengan komparasi merupakan penelitian dengan dua variabel atau lebih yang bertujuan untuk membandingkan dan mengetahui perbedaan antara dua kelompok penelitian atau lebih. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan dua kelompok penelitian yang berbeda yakni partai Gerindra dan PAN.

Dari keseluruhan judul penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan untuk meneliti perbedaan pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga kesesuaiannya dengan demokrasi prosedural yang diterapkan di Indonesia.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Rekrutmen Politik**

##### **1. Pengertian dan Jenis Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik dan sosialisasi politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena rekrutmen politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Hafied Cangara, 2008: 25). Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117).

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukannya pada jabatan yang sesuai atau tidak. Dalam ilmu politik, dikenal dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik dan

sebagainya) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Robert Dahl menggolongkan rekrutmen terbuka menjadi salah satu prasyarat sistem demokrasi selain akuntabilitas, rotasi kekuasaan, adanya pemilu, dan pemenuhan hak-hak dasar bagi warga negara. Rekrutmen politik memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan pada sistem politik yang demokratis. Berbeda dengan rekrutmen terbuka, dalam rekrutmen tertutup kesempatan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri. Rekrutmen politik tertutup biasa terjadi pada negara yang tidak menganut paham demokrasi (Sunarso, *Jurnal Civics* Vol.5 No.2: 2008: 13).

Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses rekrutmen di dalamnya. Menurut Miriam Budiardjo, apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam rekrutmen politik,

antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya (Miriam Budiardjo, 2008: 408).

KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengharapkan adanya suatu kepedulian partai politik untuk bersama-sama mencari dan menyeleksi kader (dalam hal ini calon anggota legislatif khususnya) yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik. KPU telah menetapkan beberapa persyaratan yang masih bersifat umum untuk calon legislatif yang hendak diajukan partai politik. Syarat menjadi seorang caleg (calon anggota legislatif) adalah:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti menjalankan kewajiban agamanya.
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kesetiaan yang dimaksud dibuktikan dengan suratpernyataan dari calon anggota DPR atau DPRD yang bersangkutan dengan diketahui oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya, sedangkan untuk calon anggota DPD dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

7. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bahkan orang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
10. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten, dimana penentuan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil pemeriksaan menyeluruh.
11. Terdaftar sebagai pemilih (Mohammad Najib, 2005: 12).

KPU bertugas untuk menyeleksi syarat-syarat para caleg, namun pekerjaan KPU tersebut berdasarkan koridor hukum yang jelas. Sepanjang kesebelas syarat tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan, tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak meloloskan. Maka dari itu, dibutuhkan pula sikap proaktif para anggota dan konstituen partai politik untuk mengontrol bagaimana pengurus partai menyusun daftar caleg. Undang-undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD telah memerintahkan kepada partai politik untuk membangun mekanisme demokratis dan terbuka ketika menyusun daftar caleg. Implementasi ketentuan tersebut tentu dapat

dimaknai sebagai syarat untuk juga memperhatikan keberatan pemilih ketika daftar caleg disusun, agar partai politik yang bersangkutan dipilih oleh rakyat (Mohammad Najib, 2005: 13).

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik merupakan suatu proses atau tahapan dimana orang-orang yang telah memenuhi kriteria tertentu dapat ditempatkan pada jabatan-jabatan di lembaga-lembaga politik termasuk juga partai politik. Rekrutmen yang dijalankan partai politik sangat mempengaruhi bagaimana kualitas seorang kader atau anggota partai yang memang dipersiapkan untuk menjadi anggota legislatif maupun eksekutif.

## **2. Kaderisasi dan Regenerasi**

Istilah kader atau kaderisasi (proses pengkaderan) bukan sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dan karena berbagai sertifikat formal yang dimiliki. Istilah kader lebih mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematis, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang. Komponen utama kaderisasi adalah:

- 1) Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan.
- 2) Penugasan kader, dimana para kader diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan.
- 3) Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada (H. Mangkubumi, 1989: 59).

Selain ketiga komponen di atas, seorang kader juga harus memiliki cita-cita dan idealisme untuk berjuang atau nasionalistik. Idealisme ini merupakan motivasi atau kekuatan pendorong seseorang untuk bersedia berjuang atau melibatkan diri dalam perjuangan. Dewasa ini, kecenderungan materialistik yang terlihat ditengah masyarakat membuat motif perjuangan dirasa terlalu naif dan tidak realistis. Sudah semestinya seorang kader dituntut untuk memiliki kemampuan berjuang sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing karena hanya dengan kapasitas seperti itulah tujuan perjuangan dapat dicapai. Kemampuan profesional semakin lama semakin terasa dibutuhkan, mengingat konsekuensi dinamika dan perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan diferensiasi dan spesialisasi. Kedua hal tersebut merupakan salah satu ciri perkembangan ke arah modernisasi yang perlu disadari sepenuhnya dan diberi respon dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Seorang kader juga diharapkan memiliki stamina atau daya tahan perjuangan karena pada dasarnya tidak ada proses

perjuangan yang berlangsung tanpa tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, diperlukan daya tahan perjuangan yang kuat sehingga tidak mudah putus asa dan frustrasi karena telah banyak kader yang menyerah saat menghadapi berbagai ujian dalam berjuang (H. Mangkubumi, 1989: 60).

Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa kaderisasi merupakan proses perjuangan seorang kader dimana ia dengan motivasi dan idealismenya yang tinggi diarahkan untuk memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Kaderisasi bukan merupakan proses yang cepat, akan tetapi berjenjang, sistematis, terus menerus dan cenderung memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, kaderisasi pada setiap partai politik memiliki cara tersendiri untuk melatih kader mereka yang biasanya terkait dengan penanaman ideologi dan garis perjuangan partai.

### **3. Kaderisasi Sebagai Proses Penempatan**

Kaderisasi merupakan suatu proses pengkaderan yang dilaksanakan secara terus menerus, sistematis dan konsisten mencakup tidak saja aspek kognitif tetapi juga motivatif. Setidaknya kaderisasi mencakup dua hal, yakni:

#### **a. Pendidikan kader**

Dalam kegiatan ini, yang perlu dilakukan adalah peningkatan pengetahuan (aspek kognitif) dan peningkatan kesadaran dan dorongan berjuang (bersifat motivatif). Peningkatan pengetahuan dibutuhkan sebagai bekal untuk dapat melakukan pengamatan, agar analisis yang dilakukan berwawasan luas dan rasional terhadap berbagai persoalan

yang ada di sekelilingnya. Tetapi meningkatnya pengetahuan tidaklah cukup tanpa diimbangi oleh adanya kesadaran dan dorongan untuk menggunakan pengetahuan yang didapat dalam rangka perjuangan menggapai tujuan (cita-cita). Dalam pendidikan kader perlu diberikan pengetahuan yang bersifat motivatif yang berdasarkan pada pengetahuan yang luas, sehat dan mendalam.

b. Pengembangan Kader

Pengembangan kader bertujuan untuk mematangkan dan mendewasakan kader melalui tantangan yang terdapat di tengah masyarakat, melalui akumulasi pengalaman dan penghayatan atas kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan suatu bentuk kemampuan nyata sekaligus kearifan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Pada tahap lebih lanjut, para kader diharapkan dapat mencari dan menemukan secara kreatif tantangan-tantangan tersebut dalam penghayatan dan pergumulannya di tengah masyarakat. Dengan demikian kemandirian akan tumbuh dan berkembang dalam dirinya, perjuangan mereka akan menjadi bagian dari jiwa dan kehidupannya. Pematangan dan pendewasaan kader inilah yang dirasakan sekarang ini sebagai bagian yang cukup sulit dalam melakukan kaderisasi (H. Mangkubumi, 1989: 62).

Setiap golongan atau kelompok dalam masyarakat tentu memiliki kepentingan subyektif terhadap kaderisasi, karena setiap golongan atau kelompok tersebut ingin merealisasikan tujuan-tujuannya secara efektif



melalui kadernya. Hal tersebut dapat dipahami secara wajar mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Adanya kepentingan subyektif masing-masing golongan hendaknya ditampilkan sebagai kompetisi yang sehat untuk mengisi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi pandangan tersebut, maka setiap kaderisasi perlu diarahkan demi pertumbuhan dan pengembangan kader yang memiliki wawasan luas bagi kepentingan nasional.

Dalam kegiatan kaderisasi, diharapkan tujuan akhir yang hendak dicapai yakni untuk menciptakan seorang kader yang tidak berpandangan atau berwawasan sempit, sektoral, dan hanya patuh secara buta terhadap satu kepentingan golongan tertentu tanpa melihat kepentingan nasional. Prinsip jiwa nasionalisme atau patriotisme ini menghendaki setiap kader secara sukarela dan ikhlas menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan/atau golongan (H. Mangkubumi, 1989: 64).

## **B. Tinjauan Tentang Partai Politik**

### **1. Pengertian Partai Politik**

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Menurut Cheppy Haricahyono, partai politik merupakan salah satu prasyarat bagi negara yang merdeka dan berdaulat.

Partai politik tidak saja sebagai salah satu sarana penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah negaranya, akan tetapi partai politik sekaligus terlibat dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam berbagai lembaga negara yang ada (Cheppy Haricahyono, 1991: 189).

Di negara-negara yang sudah maju, terutama negara Barat, persaingan untuk memperoleh suara dalam pemilihan yang bebas dan bersifat nasional dianggap sebagai alternatif terbaik untuk menentukan figur pemimpin politik yang mempunyai tanggungjawab terhadap pemilihnya sehingga partai politik tidak dapat dipisahkan dengan alternatif tersebut. Dengan demikian, partai politik bertindak sebagai instrumen perwakilan dan sarana untuk menjamin pergantian pemerintahan secara teratur dan tanpa pergolakan yang dapat menghancurkan keseluruhan sendi-sendi masyarakat dan negara yang sudah mapan. Tetapi perlu diingat bahwa dalam masyarakat yang demikian ini partai politik muncul ketika persoalan identitas nasional telah teratasi dan legitimasi lembaga-lembaga pemerintahan telah mengakar kuat (Any Rohyati, 2006: xviii).

Berbeda dengan perkembangan partai-partai di banyak negara maju, di negara-negara berkembang kebangkitan dan aktivitas partai politik seringkali berkaitan dengan proses pembentukan identitas nasional, pembentukan kerangka sistem politik, pengabsahan lembaga pemerintah, serta usaha-usaha untuk memperkuat persatuan nasional. Dalam kaitan ini partai politik seringkali tidak berfungsi sebagai penyedia akses bagi penyaluran tuntutan yang absah kepada penguasa, tetapi semata-mata sebagai elemen dalam

strategi persatuan nasional dan pengontrolan perbedaan pendapat (Any Rohyati, 2006: xix).

Pengertian partai politik secara etimologis menurut Jimly Assiddiqie berasal dari kata *part* yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan kepentingan. Pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik (Muhammad Ali Syafa'at, 2011: 30).

Pengertian partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli politik di dunia. Mengutip pendapat dari Carr (1965) dalam Hafied Cangara (2011: 116), partai politik adalah:

*“political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government”* (Partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).

Partai politik menurut Miriam Budiardjo (2008: 403) merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan

politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum. Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa:

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi partai politik menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo (2008: 404) adalah:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil secara materiil. (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.*)

Pendapat mengenai definisi partai politik juga dikemukakan oleh Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo (2008: 404):

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with the other group or groups holding divergent views*).

Sedangkan menurut Giovanni Sartori:

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. (*A party is any political group that present at elections, and*

*is capable of placing through elections candidates for public office)* (Miriam Budiardjo, 2008: 404).

Definisi partai politik menurut Roger H. Soltau:

*A political party is a group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies.* (Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak diorganisir secara ketat, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang bertujuan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum mereka) (Cheppy Haricahyono, 1991: 196)

Dari beberapa pendapat ahli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan organisasi politik yang memiliki ideologi dan cita-cita tertentu yang ingin diraih secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara bersaing dalam pemilu untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

## **2. Pembentukan Partai Politik**

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga sekarang, Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) undang-undang kepartaian (undang-undang mengenai partai politik). Undang-Undang kepartaian yang terakhir adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2008, yang didalamnya memuat segala pengaturan mengenai partai politik, termasuk juga syarat pembentukannya. Berikut merupakan persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia menurut Undang-undang Kepartaian No. 2 Tahun 2008 Pasal 2:

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

- 2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- 4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. Asas dan ciri partai politik;
  - b. Visi dan misi partai politik;
  - c. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
  - d. Tujuan dan fungsi partai politik;
  - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. Kepengurusan partai politik;
  - g. Pendidikan politik; dan
  - h. Keuangan partai politik.
- 5) Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan.

#### Pasal 3

- 1) Partai Politik harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum.
- 2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai:
  - a. Akta notaris pendirian partai politik;
  - b. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Kantor tetap;
  - d. Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/ kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/ kota yang bersangkutan; dan
  - e. Memiliki rekening atas nama partai politik.

Tujuan partai politik menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Pasal

10 adalah:

- 1) Tujuan umum partai politik adalah:
  - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia, dan
  - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Tujuan khusus partai politik adalah:
- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
  - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebuah partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan yang berusaha untuk memberi pengaruh terhadap kebijakan tertentu. Partai politik memiliki cita-cita dan tujuan, tidak hanya mempengaruhi kebijakan publik secara luas, tetapi juga mengarahkan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan itu melalui orang-orang yang ditempatkan pada jabatan-jabatan publik. Sebagai contoh kementerian, direktur jenderal atau direktur badan usaha milik negara. Partai politik idealnya memiliki fungsi tertentu dalam sebuah pemerintahan yang bersifat demokratis.

### **3. Fungsi Partai Politik**

Fungsi, hak, dan kewajiban sebuah partai politik telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berikut merupakan fungsi partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008 Pasal 12:

- 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.

- 3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Ramlan Surbakti, ada tujuh fungsi partai politik yaitu:

- 1) Sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan segala tuntutan masyarakat kepada pemerintah, tetapi dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Jadi dapat dikatakan bahwa partai politik berfungsi untuk mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Ramlan Surbakti, 2007: 119).
- 2) Pemadu kepentingan. Keadaan masyarakat modern yang semakin luas dan kompleks membuat banyak ragam pendapat dan aspirasi semakin berkembang. Masing-masing kelompok tentu memiliki banyak keragaman pendapat, sehingga perlu adanya suatu proses yang



dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah digabungkan, pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Agregasi dan artikulasi kepentingan itulah salah satu fungsi dalam komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan dan memasukkannya dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan dalam parlemen agar dijadikan sebagai kebijakan umum. Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah. Dalam hal tersebut, partai politik memerankan sebagai penghubung antara yang memerintah dan diperintah (Miriam Budiardjo, 2008: 405).

- 3) Sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja (melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal) maupun tidak sengaja (melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan atau masyarakat). Metode sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, masyarakat mengenal dan mempelajari norma-norma, nilai-nilai, simbol-simbol politik

negaranya dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai hal yang baik dan ideal. Indoktrinasi politik biasa dilakukan di negara dengan sistem totaliter (Ramlan Surbakti, 2007:117).

Miriam Budiardjo mengatakan proses sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa. Bagi partai politik, proses sosialisasi politik juga merupakan upaya pembentukan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum (Miriam Budiardjo, 2008: 407).

- 4) Sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya pada negara yang menganut sistem politik totaliter dengan partai politik tunggal atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting untuk keberlangsungan sebuah sistem politik (Ramlan Surbakti, 2007: 118).
- 5) Pengendali konflik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi maupun kepentingannya

sehingga konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

- 6) Partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung dan menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.
- 7) Fungsi partai politik sebagai kontrol politik. Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif

objektif. Tolok ukur yang dimaksud adalah berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kontrol politik yaitu meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang sehingga kebijakan dan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tolok ukur tersebut. Dalam fungsi kontrol, partai politik harus menggunakan tolok ukur yang merupakan kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama (Ramlan Surbakti, 2007: 118). Dalam keadaan yang sehat dan demokratis, masyarakat selalu berkembang dan perkembangan itu secara otomatis akan dengan sendirinya memaksa adanya perubahan (transformasi sosial) yang membutuhkan sebuah kontrol. Kontrol yang dilakukan haruslah bersifat terbuka (diketahui dan diterima oleh masyarakat), mendidik, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam bernegara seperti yang dikehendaki Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keterbukaan melakukan kontrol dianggap penting karena menyangkut hak setiap warga negara untuk tahu (*rights to know*) terhadap apa yang akan terjadi didalam negaranya, karena hal tersebut menyangkut rasa berkebangsaan dan tanggung jawab terhadap perkembangan negara (H. Mangkubumi, 1989: 43).

Berdasarkan kenyataannya, tidak semua fungsi partai politik dilaksanakan dalam porsi dan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak hanya bergantung pada sistem politiknya, akan tetapi juga dapat dipengaruhi

faktor lain, seperti tingkat dukungan yang diberikan anggota masyarakat terhadap partai politik (berakar atau tidaknya partai dalam masyarakat), kemampuan adaptasi, kompleksitas organisasi, otonomi, dan kesatuannya (Ramlan Surbakti, 2007: 121).

#### **4. Hak dan Kewajiban Partai Politik**

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, selain membahas mengenai fungsi partai politik, juga membahas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki partai politik di Indonesia. Berdasarkan pasal 12, partai politik memiliki hak untuk:

- 1) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara.
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- 3) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Mengusulkan pemberhentian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.
- 10) Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, partai politik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- 4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- 5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.
- 6) Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
- 7) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
- 8) Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka kepada masyarakat.
- 9) Membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 10) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
- 11) Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

## **5. Tipologi Partai Politik**

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.

Modernisasi mengakibatkan diferensiasi dalam masyarakat atas dasar pekerjaan, pendidikan, status, agama, etnik dan sebagainya yang pada gilirannya dapat mendorong konflik atau sebaliknya, kerjasama diantara

anggota masyarakat. Dalam konteks ini hubungan elit-massa merupakan faktor yang sangat penting bagi berfungsinya keseluruhan sistem politik (Any Rohyati, 2006: xx).

Keterbukaan organisasi politik sangat erat hubungannya dengan semangat dan watak kebangsaan. Keterbukaan organisasi politik merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat mendorong pertumbuhan semangat dan watak kebangsaan. Disamping itu, keterbukaan mengandung aspek demokrasi (H. Mangkubumi, 1989: 43).

Tipologi partai politik merupakan pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Berdasarkan asas dan orientasi, partai politik dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:

- 1) Partai pragmatis, merupakan suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Hal tersebut berarti bahwa perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun pemimpin utamanya. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini bukan berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya. Ideologi yang dimaksud lebih merupakan gagasan umum daripada doktrin dan program konkret yang siap dilaksanakan.

- 2) Partai doktriner, merupakan partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah prinsip dan program dasar partai yang telah dirumuskan secara kongkret. Partai komunis dimana saja merupakan contoh partai doktriner.
- 3) Partai kepentingan, merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Biasanya ditemukan pada negara yang menganut sistem multi-partai, atau terkadang pada sistem dwi-partai.

Tipologi partai politik berdasarkan komposisi dan fungsi anggota dibagi menjadi dua tipe, yakni:

- 1) Partai massa atau partai lindungan, merupakan partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat terselenggara dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan



kebijakan tertentu. Kelemahan partai ini tampak pada saat pembagian kursi (jabatan) dan perumusan kebijakan karena karakter dan kepentingan setiap kelompok dan aliran sangat menonjol. Ketidakmampuan partai dalam membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak merupakan ancaman bagi keutuhan partai.

- 2) Partai kader, merupakan partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten. Struktur organisasi partai kader sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggungjawab sangat jelas, karena itu partai kader sering disebut partai yang sangat elitis (H. Mangkubumi, 1989: 41).

Organisasi politik masih terdapat adanya refleksi dan pengaruh-pengaruh ikatan sosial tertentu (seperti agama dan/ atau kepentingan) yang mewarnai kehidupan berorganisasi. Tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menemukan sebuah metode yang tepat untuk mengadakan perubahan secara positif (tanpa mengakibatkan gejala sosial dengan tetap mempertahankan kestabilan sosial politik dan pertahanan keamanan) dan bertanggung jawab (berani mengambil resiko atas tindakan yang dilakukan) dan adil (tidak merugikan pihak lain untuk keuntungan golongan sendiri). Dalam hal ini, pendidikan politik massa menjadi teramat penting untuk mencapai perubahan (reformasi politik) secara baik dan wajar (H.

Mangkubumi, 1989: 42). Terkait dengan basis sosial dan tujuannya, partai politik juga diklasifikasikan menjadi empat tipe, yakni:

- 1) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
- 2) Partai politik yang beranggotakan kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.
- 3) Partai politik yang beranggotakan kelompok pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Hindu, Budha, Kristen, dan lain sebagainya.
- 4) Partai politik yang beranggotakan kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, maupun daerah tertentu.

Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi tiga tipe yakni:

- 1) Partai perwakilan kelompok, merupakan partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.
- 2) Partai pembinaan bangsa, merupakan partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.
- 3) Partai mobilisasi, merupakan partai yang berusaha memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat (Ramlan Surbakti, 2007: 121).

Menurut Ichlasul Amal, tipologi partai politik dalam sistem kepartaiannya hendaknya didasarkan pada:

- 1) Sumber-sumber dukungan partai. Diajukan suatu perbedaan dasar komprehensif lawan sektarian. Yang termasuk komprehensif adalah semua partai politik yang berorientasi pada pengikut (*clientele-oriented*), yaitu partai yang berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga negara. Sedangkan partai-partai sektarian adalah partai yang memakai kelas daerah (*region*) atau ideologi sebagai daya tariknya. Dua tipe ini tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas. Partai-partai sosialis dan agamis bersifat sektarian, tetapi mereka tidak eksklusif. Partai-partai di Inggris dan Amerika adalah komprehensif, tetapi mereka tidak mungkin dapat berharap memperoleh keberhasilan yang sama untuk semua kelompok. Bagaimanapun juga, mereka hanya mendiskriminasikan para pengikut mereka, yakni bahwa mereka pada tingkat tertentu bersifat “eksklusif”.
- 2) Organisasi Internal. Berdasarkan organisasi internalnya, partai digolongkan menjadi dua, yakni partai tertutup dan terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan keanggotaannya terbatas atau partai yang mengenakan kualifikasi (persyaratan) ketat untuk keanggotaannya. Partai terbuka adalah partai-partai yang membolehkan setiap orang menjadi anggota dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan atau tidak sama sekali bagi keanggotaannya. Partai tertutup cenderung menjadi otoriter, yaitu para anggota diharapkan mengikuti keputusan

yang dibuat oleh para pemimpin tanpa memiliki kemudahan akses terhadap proses pertimbangan yang terbuka. Kebalikannya adalah ciri partai terbuka. Partai tertutup cenderung menekankan aksi langsung dan diarahkan terhadap kontrol monopolistik pemerintah. Partai-partai terbuka menekankan aksi politik dan menghormati pluralisme politik.

- 3) Cara-cara bertindak dan fungsi. Dua tipe dasar partai politik berdasarkan cara bertindak dan fungsi adalah *diffused* (menyebarkan) dan *specialized* (khusus). Partai yang terspesialisasi menekankan keterwakilan, agregasi, pertimbangan, dan perumusan kebijaksanaan, partisipasi, dan kontrol terhadap pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan untuk suatu periode waktu tertentu. Sedangkan partai *diffused*, menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi. Mengenai cara tindakannya, partai *diffused* umumnya akan menggunakan beberapa cara untuk bisa berkuasa, sedangkan partai yang terspesialisasi akan membatasi tipe tindakan mereka kepada prosedur-prosedur yang diterima (Ichlasul Amal, 1996: 35).

**Tabel 1. Tipologi Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian**

P A R T A I		<b>INTEGRATIF</b>	<b>KOMPETITIF</b>
	<b>DUKUNGAN</b>	<b>SEKTARIAN</b> (eksklusif, regional, kelas, sangat ideologis)	<b>KOMPREHENSIF</b> (Berorientasi klien, pragmatis)
	<b>ORGANISASI</b>	<b>TERTUTUP</b> (Otoriter, aksi langsung, represif)	<b>TERBUKA</b> Serba membolehkan (permisif) dan representatif
	<b>CARA-CARA KEGIATAN DAN FUNGSI</b>	<b>DIFFUSED</b> (Integrasi nasional, pembangunan masyarakat, menekankan pada mobilisasi)	<b>TERSPEKIALISASI</b> (Agregatif, representatif)
		<b>SATU-PARTAI</b>	<b>DUA-PARTAI atau MULTI-PARTAI</b>

(Sumber: *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, 1996: 35)

Sistem kepartaian bersifat integratif apabila partai yang ada bersifat sektarian dalam menekankan penolakan simbol-simbol tindakan politik, tertutup, *diffused*. Sistem partai bersifat kompetitif bilamana partai partai yang ada komprehensif, dimana organisasi partai bersifat terbuka dan fungsi-fungsinya terspesialisasikan. Sistem kepartaian integratif cenderung menjadi sistem partai tunggal, sedangkan sistem kepartaian kompetitif cenderung menjadi dua-partai atau multi-partai (Ichlasul Amal, 1996: 35).

Selain partai politik, sistem kepartaian juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Maurice Duverger menggolongkan sistem politik berdasarkan jumlah partainya, yakni sistem partai tunggal, dua partai (dwi-partai), dan banyak partai (multi-partai). Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik (Ramlan Surbakti, 2007: 124). Definisi sistem kepartaian yang lebih

umum dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yakni sistem kepartaian sebagai perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem tersebut (Miriam Budiardjo, 2008: 415).

Pengklasifikasian sistem kepartaian tersebut menurut Ramlan Surbakti memiliki sejumlah catatan. Pertama, istilah sistem dalam kata “sistem partai tunggal” merupakan *contradiction in termis* karena dalam setiap sistem terdiri atas lebih dari satu bagian. Kedua, tidak membedakan secara tegas antara bentuk partai tunggal totaliter (komunis ataupun fasis) dengan bentuk partai tunggal otoriter, dan bentuk partai tunggal dominan (tidak totaliter maupun otoriter). Ketiga, sejumlah negara didunia ini tidak memiliki partai politik seperti yang diterapkan di Arab Saudi dan Brunei Darussalam yang menganut sistem Otokrasi Tradisional. Keempat, penggolongan sistem kepartaian tersebut hanya berdasarkan jumlah partai saja (Ramlan Surbakti 2007: 124).

### **C. Tinjauan Tentang Pendidikan Politik**

Pendidikan politik merupakan salah satu metode sosialisasi politik yang banyak dilakukan di negara-negara penganut demokrasi. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, masyarakat mengenal dan mempelajari norma-norma, nilai-nilai, simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik (Ramlan Surbakti, 2007: 117). Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, pendidikan

politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik atau *political education* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Partisipasi politik warga negara adalah hal yang sangat pokok dan penting bagi negara berpaham demokrasi seperti Indonesia, hal ini juga berkaitan dengan paham kedaulatan rakyat. Paham kedaulatan rakyat secara umum diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan begitu, sangat jelas pentingnya pendidikan politik untuk warga negara secara kontinu berdasarkan nilai-nilai tertentu.

Masalah politik merupakan masalah yang kompleks dan sangat dinamis sehingga diperlukan penghayatan dan pemikiran yang mendalam untuk menemukan solusinya. Rakyat perlu memahami persoalan-persoalan dan tantangan dalam tahap dan atau sistem politiknya agar dapat menjawab dan memecahkan masalah politik secara tepat. Dalam hal ini, pendidikan politik dipandang sebagai pendidikan yang tidak akan pernah selesai. Di Indonesia, telah dibentuk berbagai lembaga perwakilan yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga partisipasi warga negara dapat menjadi lebih mudah dan maksimal. Adanya petugas-petugas politik yang berkualitas tinggi hampir selalu merupakan hasil dari pendidikan politik.

Dengan demikian, tentu masyarakat luas perlu ditingkatkan pengetahuan politiknya, agar dapat menjadi insan-insan politik yang sadar atas

perannya, mengetahui hak-haknya dan mempunyai tanggungjawab. Masyarakat harus terbina dan terbiasa untuk memilih hal-hal yang baik/konstruktif dan meninggalkan hal-hal yang buruk tentang konsepsinya terhadap objek-objek politik yang diyakini kebenarannya hanya atas dasar sumber-sumber kekayaan rohani (*spiritual resources*) yang dimilikinya. Proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik, sedemikian rupa harus merata kesemua lapisan masyarakat secara vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, pengetahuan politik tidak semata-mata merupakan monopoli dari elit (*upper class*) saja, walaupun elit seringkali merupakan elemen penggerak yang vital (Rusadi Kantaprawira, 1977: 54).

Sukses atau tidaknya pendidikan politik bagi masyarakat juga terkait dengan kebudayaan dan orietasi-orientasi politik. Dalam peningkatan kapabilitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, maka kebudayaan politik sebagai subjek perlu diarahkan ke kebudayaan politik sebagai partisipan. Pendidikan politik ini dapat diselenggarakan antara lain melalui:

- 1) Bahan-bahan yang dapat dibaca, seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang biasa membentuk pendapat umum.
- 2) Siaran seperti radio yang dapat didengar dan televisi serta film yang dapat dilihat dan didengar (audiovisual).



- 3) Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat seperti masjid dan gereja yang menyampaikan khotbah, serta kemungkinan juga melalui pendidikan formil atau informil.

Menurut Almond dan Coleman dalam Rusadi Kantaprawira, 1977: 56, pendidikan politik:

*The existence in all political systems of methods of political recruitment and training led us to the questions, 'How are people recruited to and socialized into political roles and orientations in different political system?' or the recruitment and socialization function.*

(Yang ada dalam setiap sistem politik adalah metode-metode perekrutan dan latihan politik yang menyebabkan kita bertanya, 'Bagaimanakah rakyat direkrut dan dimasyarakatkan kearah peranan-peranan dan orientasi-orientasi politik dalam sistem politik yang berbeda-beda?' atau fungsi perekrutan dan sosialisasi).

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat hubungan antara pendidikan politik yang merupakan bagian dari sistem politik yang berorientasi pada metode perekrutan dan latihan politik bagi masyarakat (warga negara). Latihan politik ini dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat kepada peranannya sebagai warga negara khususnya dalam berpartisipasi sesuai dengan orientasi politik yang diyakini

#### **D. Tinjauan Tentang Demokrasi Prosedural**

Desentralisasi memberikan warna lain dalam proses demokratisasi di Indonesia. Keragaman aktor dalam proses politik dan pemerintahan tidak hanya ada di arena politik nasional tetapi juga di daerah (Siti Zuhro, 2009: 9). Interaksi antar aktor berlangsung dalam arena kompetisi politik dimana aktor-aktor dalam masyarakat politik berkontestasi dalam merebut jabatan terpilih

(*elected official*). Dalam proses kompetisi itu, aktor-aktor politik (politisi dan partai politik) bertemu, bersentuhan dan membangun jejaring dengan aktor yang lain, seperti masyarakat sipil dan ekonomi (Siti Zuhro, 2009: 22).

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat atau orang banyak dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Demokrasi menurut bahasa Yunani Kuno memiliki arti kekuasaan yang berada di tangan rakyat (Hafied Cangara, 2011: 43). Sedangkan Miriam Budiardjo (1997: 50) menyatakan bahwa demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Jadi kata kunci demokrasi adalah rakyat, dimana rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk memerintah (Djihad Hisyam dalam *Jurnal SOCIA* Vol.1 No.2).

Dalam konsep klasik tersebut demokrasi dapat juga bermakna pemerintahan yang dijalankan oleh banyak pihak “*rule by the many*” atau suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat “*rule by the people*”. Demokrasi berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yakni representasi (perwakilan) dan partisipasi. Representasi menunjukkan pertimbangan pada kepentingan mayoritas atau orang banyak, dan partisipasi menunjukkan keikutsertaan publik pada aktivitas politik. Dalam pandangan Barat, demokrasi adalah suatu system politik yang ditandai bukan hanya pemilihan yang bebas dan jujur (*free and fair*), tetapi juga pemisahan kekuasaan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), dan penyelenggaraan kekuasaan diatur oleh hukum, melindungi kemerdekaan berbicara,

berkumpul, beragama dan hak-hak pribadi seseorang (Hafied Cangara, 2011: 53).

Jadi dapat disimpulkan ada beberapa kata kunci yang terkait dengan demokrasi, yakni rakyat, representasi, dan partisipasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang terwujud dengan partisipasinya dalam arena politik seperti pemilu. Demokrasi juga fokus pada kepentingan umum warga negara, hal ini terwujud dalam representasi (perwakilan) yang hendak menunjukkan kepentingan publik melalui suara mayoritas.

Dalam pandangan Huntington, pemilu di era transisi merupakan tanda berakhirnya rezim non-demokratik (*the inaguration on democratic rezim*), sekaligus sebagai pelembagaan demokrasi dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak disebabkan oleh terjadinya tarik menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Kedua, bermakna sebagai pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratik (*the inaguration of the democratic rezim*) yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang. Ketiga, pemilu di era transisi merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi (*the inaguration of the democartic system*) yaitu suatu usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim status quo untuk menduduki kursi kekuasaan (Any Rohyati, 2006: viii).

Dalam demokrasi kontemporer, kajian akademis tentang demokrasi membagi dua kategorisasi pemaknaan besar, yakni konsepsi minimalis dan maksimalis. Jika di Indonesia, konsepsi minimalis lebih dikenal dengan nama

demokrasi prosedural yang dikenakan pada kepada sistem politik yang melaksanakan perubahan kepemimpinan secara reguler melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung jujur, bebas, terbuka dan melibatkan massa pemilih yang universal (tanpa pembedaan ras, agama, suku, dan *gender*). Bagi konsepsi maksimalis, pelaksanaan pemilu saja tidaklah cukup bagi suatu sistem politik untuk mendapatkan gelar demokrasi. Di Indonesia, konsepsi maksimalis lebih dikenal dengan nama demokrasi substansial. Demokrasi substansial mensyaratkan penghormatan terhadap hak-hak sipil yang lebih luas dan penghargaan terhadap kaidah-kaidah pluralisme yang mendasar. Kedua konsepsi mengenai demokrasi tersebut sama-sama menghendaki pemilu sebagai prasyarat demokrasi. Apabila sebuah rezim yang menjamin pluralitas dan hak-hak sipil tetapi tidak melakukan pergantian kekuasaan politik secara reguler melalui pemilihan umum, tidak dapat mengklaim dirinya sebagai negara demokratis (Any Rohyati, 2006: viii).

Dalam Afan Gaffar (1999: 8) demokrasi terbagi atas dua pemahaman yakni secara empirik (prosedural) dan normatif. Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik memberikan pemahaman tentang demokrasi pada perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.

Afan Gaffar menyimpulkan sejumlah prasyarat untuk mengamati apakah sebuah *political order* merupakan sistem yang demokratik atau tidak, yaitu:

- 1) Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya serta mempertanggungjawabkan segala ucapan dan perbuatannya.
- 2) Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Biasanya partai-partai politik yang menang pada suatu pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Pada negara yang tingkat demokrasi rendah, rotasi kekuasaannya rendah pula.
- 3) Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen terbuka yang berarti setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat memiliki peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.
- 4) Pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, pemilu diadakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

- 5) Menikmati hak-hak dasar. Setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak menyatakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan lain sebagainya (Afan Gaffar, 1999: 8).

Demokrasi prosedural menurut Gregorius Sahdan merupakan salah satu instrumen transisi rezim otoritarian gelombang pertama, kedua sampai dengan yang ketiga, yang memberikan peranan yang besar terhadap kemerdekaan individu, keterlibatan publik dan jaminan hak warga negara dalam pemerintahan. Demokrasi prosedural juga merupakan jembatan yang memberikan arah bagi peralihan rezim non-demokratik, dan dapat dengan mudah melihat apakah ada fakta transisi; apakah ada pemilu dalam transisi; apakah pemilu dilaksanakan dengan jujur; apakah ada pembentukan lembaga-lembaga demokratis; dan apakah lembaga-lembaga demokratis itu berfungsi (Any Rohyati, 2006: xi).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat pembedaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu (Sumadi Suryabrata, 2013: 75). Sugiyono (2012: 9) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Ringroad Utara Gondangan, RT. 005RW. 050, Maguwoharjo, Depok, Sleman dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ngeksigondho No. 5, Prenggan, Kotagede Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan DPD Partai Gerindra dan DPW PAN merupakan lokasi pendaftaran sekaligus rekrutmen bagi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Partai Amanat Nasional maupun Partai Gerindra. Penelitian telah dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2014.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 218). Dalam penelitian ini, kriteria yang peneliti tetapkan meliputi orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Partai Gerindra dan PAN. Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Wakil sekretaris bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) sekaligus sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Kepala kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Anggota Badan Seleksi Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara

Menurut Lexy J. Moloeng (2010: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang melibatkan dua pihak yakni pewawancara



dengan terwawancara. Menurut Patton (1980: 197) dalam Lexy J. Moloeng (2010: 187), wawancara dibagi menjadi tiga berdasarkan perencanaan pertanyaanya, yakni wawancara pendekatan informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara baku terbuka. Dalam penelitian ini digunakan wawancara jenis kedua, yakni wawancara terstruktur dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Penelitian ini memiliki tiga tujuan yang jelas sehingga wawancara terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum wawancara akan memudahkan peneliti untuk mencapai ketiga tujuan penelitian yang telah ditetapkan diawal.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumentasi dibagi menjadi dua, yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen tersebut menjadi sumber data untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan (Lexy J. Moloeng, 2010: 216). Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi AD/ ART Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Amanat Nasional, hasil-hasil rekernas Partai Amanat Nasional, peraturan-peraturan yang diberlakukan partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Amanat Nasional terkait rekrutmen. Partai Gerindra belum melaksanakan Rakernas partai sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan hasil Rakernas partai Gerindra.

#### **E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Setelah dilakukan pengambilan data melalui wawancara dan dokumen, kemudian untuk teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan *cross check*. *Cross check* data adalah pemeriksaan kesesuaian data yang diperoleh melalui wawancara antara narasumber satu dan yang lainnya dengan dokumen yang didapat. Dalam penelitian ini, *cross check* data dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, khususnya data mengenai perbedaan pola rekrutmen partai politik Gerindra dan PAN, kesesuaian pola rekrutmen yang diterapkan dengan demokrasi prosedural, dan usaha partai Gerindra dan PAN untuk menemukan calon legislatif yang berkualitas.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta dan peristiwa kongkrit kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan menyajikan data dan menganalisis data dalam bentuk deskriptif.

Teknik analisis data secara umum dapat digambarkan dengan empat langkah sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diperlukan sebagai langkah awal dalam analisis data dalam penelitian kualitatif karena dimungkinkan data yang diperoleh

peneliti sebagai hasil wawancara dan dokumentasi sangat banyak dan terkadang bersifat umum (kurang fokus pada permasalahan). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan kejelasan dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila diperlukan. Data hasil wawancara pertama penelitian ini masih tergolong umum, sehingga data direduksi pada wawancara kedua sehingga masalah menjadi lebih fokus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

## 2. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan upaya memilah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori diberi nama yang disebut 'label' (Lexy J. Moloeng, 2010: 289). Dalam penelitian ini, labelisasi merupakan hal penting terutama terkait dengan labelisasi mengenai kategori (aspek) yang menjadi acuan untuk membedakan pola rekrutmen yang PAN dan Gerindra lakukan.

## 3. Display Data

Setelah melakukan reduksi data dan kategorisasi, maka data yang diperoleh kemudian disajikan (display data). Dalam penelitian kualitatif, display data dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2012: 249). Display data yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan dengan tabel, berupa tabel perbedaan dan persamaan pola rekrutmen, serta tabel yang menyajikan upaya PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas calegnya.

#### 4. Kesimpulan

Tahap terakhir yang dilakukan dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan (*conclusion*). Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel (Sugiyono, 2012: 252). Kesimpulan disajikan dengan mendiskripsikan hasil display data yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi PAN dan Partai Gerindra di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kantor sebagai pusat kegiatan kepartaian yang ditentukan berdasarkan tingkatan daerahnya. Untuk tingkat Provinsi Yogyakarta, PAN memiliki DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) yang beralamat di Jalan Ngeksigondho No.5, Prenggan, Kotagede Yogyakarta. Selain DPW, PAN juga memiliki DPD yaitu Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Kabupaten, DPC (Dewan Pimpinan Cabang) untuk tingkat Kecamatan, dan DPRt (Dewan Pimpinan Ranting) untuk tingkat Kelurahan.

Partai Gerindra di Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kantor pusat yang masing-masing ditentukan oleh tingkatan daerahnya, yaitu DPD (Dewan Pimpinan Daerah) untuk tingkat Provinsi, dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) untuk tingkat Kabupaten. Selain itu Gerindra memiliki PAC (Pimpinan Anak Cabang) untuk tingkat Kecamatan, dan Pimpinan Ranting untuk tingkat Kelurahan. Pembagian masing-masing berdasarkan tingkat daerahnya dimaksudkan untuk mempermudah berbagai hal terkait tugas kepartaian berdasarkan wilayahnya masing-masing.

Masing-masing partai politik memiliki *culture* tertentu yang tidak dapat disamakan satu sama lain yang pada akhirnya menjadi ciri khas tersendiri dari sebuah partai politik. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan dua partai yang berbeda latar belakang dan keduanya sama-sama terdaftar sebagai partai peserta pemilu tahun 2014

ini. PAN merupakan partai berbasis Islam yang lebih dahulu berdiri pada tahun 1998 dibandingkan Gerindra yang baru mendeklarasikan berdirinya partai pada tahun 2008. Dilihat dari sejarah pembentukan partai, keduanya memiliki dasar perjuangan yang berbeda yang melatar belakangi berdirinya masing-masing partai.

#### **1. Asas dan *Platform* PAN**

Asas dan *platform* dibuat bersamaan dengan berdirinya PAN sehingga *platform* menjadi dasar pendirian PAN ketika dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998. *Platform* merupakan landasan kerja politik serta berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan langkah dan perjalanan PAN di masa depan. Secara substansial, *platform* PAN menyebutkan bahwa PAN merupakan partai politik yang memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kebebasan. Setiap manusia diniscayakan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan politik. Ekonomi, budaya dan berperan serta dalam mengembangkan kemanusiaan. PAN merupakan partai yang menghormati dan mendorong kemajemukan, wujud nyata adalah partai ini merupakan sekumpulan manusia dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar belakang etnis, suku, agama dan gender. PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif.

PAN menentang segala bentuk kediktatoran, totaliterisme dan otoriterisme, mengingat semua ini bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. PAN menjunjung tinggi demokrasi untuk mewujudkan tatanan sosial dan politik yang memungkinkan masyarakat madani mengawasi

kekuasaan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah PAN memposisikan dirinya untuk bersaing dengan partai-partai lain secara terbuka, adil dan jujur demi meraih dukungan rakyat.

Asas merupakan dasar pembentukan *platform* PAN yang keduanya terkandung dalam visi misi dan AD/ART PAN. Pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), asas PAN diwadahi dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam”. Secara lebih lengkap, asas PAN adalah:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa yang membawa rahmat bagi sekalian alam;
- 2) Kebangsaan yang bersatu, berdaulat, bermartabat;
- 3) Kerakyatan yang demokratis, adil, dan sejahtera.

## **2. Visi dan Misi PAN**

Visi PAN adalah menjadi partai terdepan mewujudkan masyarakat madani dengan membangun pemerintahan yang bersih, membangun negara yang berdaulat yang diridhai Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Misi PAN adalah:

- 1) Memenangkan PAN dalam setiap Pemilu.
- 2) Mewujudkan kader yang berkesadaran spiritual, sosial dan politik yang tinggi, cerdas, ikhlas, pluralis, tangguh, profesional, mandiri, progresif, inovatif, konsisten.
- 3) Mewujudkan PAN yang dekat dan membela kepentingan rakyat.

- 4) Membangun organisasi PAN yang modern berdasarkan sistem, manajemen dan budaya demokrasi yang kuat dan mengakar.
- 5) Mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang demokratis, berkeadilan sosial, makmur, damai, cerdas, mandiri dan partisipatif.
- 6) Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 7) Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.

Dari penjabaran visi dan misi PAN tersebut, sangat nampak bahwa PAN merupakan partai yang sangat religius dan menjunjung tinggi demokrasi dalam berbagai aturan dan kebijakannya. Hal ini juga mempengaruhi aturan rekrutmen partai terhadap calon anggota legislatif baik di DPP, DPW, DPD, maupun DPRt.

### **3. Fungsi Asas dan *Platform* Bagi Kader PAN**

#### **a. Penyelenggara Organisasi**

Organisasi dalam konteks partai politik secara kasat mata menampilkan wujudnya ke dalam berbagai skema kegiatan. Pada organisasi inilah terjadi pewadahan terhadap berbagai kegiatan hingga pada taraf pelaksanaan. Tetapi, untuk mampu sampai ke taraf pelaksanaan kegiatan



dalam organisasi yang canggih, membutuhkan visi yang dapat diadopsi dari asas *platform* partai. Itulah mengapa setiap kader sejatinya harus mempertimbangkan muatan substansial dalam asas *platform* partai. Ideologi yang terdiri dari asas dan *platform* partai berfungsi sebagai pijakan dasar dalam menjalankan tiga agenda dasar partai, yaitu:

- 1) Rujukan untuk merumuskan program kerja.
- 2) Rujukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Rujukan dalam evaluasi dan pengawasan

b. Pengkaderan

Kebutuhan partai politik yang sangat besar terhadap pengkaderan adalah untuk menjawab kebutuhan yang sangat mendasar bagi eksistensi partai dalam jangka panjang. Pengkaderan ini memiliki kaitan erat dengan pertanyaan: Apakah partai politik mampu membentuk jati diri pada setiap manusia pendukungnya dan mengarahkan para kader pada perilaku bermartabat. Disamping itu, pengkaderan berada dalam tataran tanggungjawab untuk melahirkan kader-kader visioner yang memiliki kecerdasan dalam berpolitik. Dalam konteks ini, asas dan *platform* partai memegang peranan penting untuk dijadikan pijakan pembentukan jati diri, perilaku dan kecerdasan para kader dalam proses pengkaderan pada berbagai jenjang.

c. Perluasan dukungan konstituen

Fungsi asas dan *platform* PAN digunakan untuk keperluan perluasan dukungan konstituen terkait pula secara erat dengan komunikasi politik,

agregasi dan artikulasi kepentingan, upaya menarik sebanyak mungkin simpati publik, pembentukan citra serta penentuan positioning partai. Berbagai dimensi dalam upaya perluasan dukungan konstituen itu bahkan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi sebuah partai untuk mampu memenangkan kompetisi politik. Hal tersebut tentu berkaitan dengan komunikasi politik yang harus dilakukan partai politik. Partai tentu tidak bisa serta merta mengembangkan filosofi maupun strategi dalam komunikasi politik, dengan memahami secara saksama terhadap asas dan *platform* partai, terbuka kemungkinan untuk menemukan filosofi, strategi, maupun taktik dalam komunikasi politik.

Agregasi merupakan peran fundamental partai politik dalam menyerap tuntutan dan aspirasi publik. Tidak semua partai politik dapat menjalankan peran agregasi, mengingat terlampau luas dan dalamnya tuntutan maupun aspirasi publik tersebut. Upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan agregasi berarti sama dan sebangun maknanya dengan menentukan pilihan dari begitu kompleksnya tuntutan dan aspirasi publik. Dengan daya dukung asas dan *platform*, agregasi itu lebih mudah dirumuskan, karena dalam asas dan *platform* cita-cita partai politik dijelaskan secara komprehensif. Cita-cita tersebut yang dijadikan instrumen seleksi terhadap berbagai hal yang dianggap penting untuk diagregasikan. Formula serupa berlaku pada segenap upaya untuk melakukan artikulasi politik. Dari sinilah kehendak untuk memperluas dukungan konstituen lebih mudah dilakukan.

Dalam penekanan tertentu, perluasan dukungan konstituen (pemilih/pendukung) terkait erat dengan kemampuan menarik simpati publik. Dalam mekanisme kerja partai politik ada semacam prinsip kerja resiprokal (timbal balik) yang memungkinkan partai politik meraih dukungan luas dari masyarakat, yaitu bilamana partai politik benar-benar mampu menarik simpati publik, untuk meraih simpati publik, dibutuhkan acuan dan disinilah asas dan *platform* partai memiliki peran. Asas dan *platform* partai merupakan sumber inspirasi untuk melakukan berbagai upaya menarik simpati publik. Hal yang sama berlaku pada pembentukan citra partai secara positif dan pada upaya partai menentukan *positioning* secara tepat dalam konstelasi politik.

d. Konstruksi kebijakan publik

Dalam hubungan antara negara dan masyarakat, kebijakan publik merupakan dimensi yang sangat krusial. Dalam kenyataannya, tidak semua kebijakan publik berlandaskan moralitas dan memiliki jaminan rasionalitas. Pada tataran inilah partai politik dituntut mampu mengawal lahirnya kebijakan yang pro rakyat. Dasar-dasar konsepsional untuk meningkatkan dan memperluas kontribusi PAN mendorong lahirnya kebijakan yang pro rakyat secara nyata yang sesuai dengan asas dan *platform* PAN.

e. Rujukan Eksekutif dan Legislatif

Asas dan *platform* PAN merupakan rujukan pembentukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan kedudukan PAN sebagai partai politik yang berdampak pada keharusan PAN berkontribusi dalam kekuasaan

eksekutif dan legislatif. Sehingga asas dan *platform* PAN berfungsi sangat utama dalam hal ini.

#### **4. Visi Misi Partai Gerindra**

Partai Gerindra merupakan partai yang tergolong baru karena partai ini didirikan dan dideklarasikan pada tanggal 6 Februari 2008. Dalam deklarasi tersebut termaktub visi misi dan manifesto partai yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan dan berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas partai Gerindra secara umum adalah partai rakyat, berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jati diri partai adalah kebangsaan, kerakyatan, religious, dan keadilan sosial.

Visi misi partai tercantum pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Gerindra. Visi partai Gerindra adalah menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Misi partai Gerindra adalah:

- 1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- 2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- 3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- 4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum serta melindungi seluruh warga negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau latar belakang golongan.
- 5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu legislatif dan pemilu presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat di setiap tingkat pemerintahan.

Dari penjabaran mengenai visi misi partai Gerindra, terlihat bahwa partai ini cenderung lebih bersifat nasionalis yang dilatar belakangi sejarah perjuangan pembentukan partai Gerindra. Visi misi partai Gerindra juga dilatar belakangi oleh manifesto perjuangan partai yang berisi tentang semangat perjuangan partai yang dimulai pada saat partai Gerindra melaksanakan deklarasi pada tahun 2008.

## **B. Perbedaan Pola Rekrutmen Caleg Antara Partai Gerindra dan PAN**

### **1. Rekrutmen Calon Anggota DPRD PAN**

Secara umum, rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Pola rekrutmen yang digunakan Partai Amanat Nasional (PAN) meliputi pola rekrutmen terbuka dan tertutup. PAN membuka kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftar sebagai calon legislatif mewakili partai. PAN memberikan pengumuman kepada masyarakat lewat berbagai cara sosialisasi, yakni dengan pamflet, dan berbagai bentuk pengumuman di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN untuk caleg DPRD Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN untuk caleg DPRD Kabupaten/ Kota. Dengan menerapkan pola rekrutmen terbuka, alur pendaftaran calon menggunakan *stelsel aktif* yakni dengan keaktifan calon sendiri untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan tim panitia pendaftaran PAN yang kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi.

Pola rekrutmen tertutup berlaku bagi perekrutan calon legislatif yang berasal dari kader partai sendiri. Untuk pengumuman pencalonan bagi kader partai (*internal*) tentu lebih mudah, dengan memanfaatkan agenda rapat partai misalkan, dalam rapat tersebut dapat diumumkan bagi kader partai yang hendak mendaftar/ mencalonkan diri sebagai caleg partai. Pola rekrutmen tertutup ini menggunakan *stelsel pasif*, yakni calon legislatif dihubungi dan ditunjuk oleh partai untuk maju sebagai calon legislatif dengan dibantu untuk

memenuhi sebagian persyaratan yang telah ditetapkan, misalkan pengurusan administrasi kesehatan, pengurusan dokumen-dokumen tertentu, dan lain-lain. Tim dari Partai Amanat Nasional yang bertugas mengurus rekrutmen caleg DPRD Provinsi yakni KPPW (Komite Pemenangan Pemilu Wilayah). KPPW merupakan panitia *ad hoc* yang terdiri dari tiga tim yakni tim pendaftaran Bacaleg, tim klarifikasi dan verifikasi data Bacaleg, dan tim monitoring Bacaleg. KPPW tidak berfungsi politis, tetapi berfungsi teknis, maka dari itu anggota KPPW tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai caleg. Partai Amanat Nasional mensosialisasikan secara mandiri kepada masyarakat atau dengan kata lain partai tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun dalam usaha sosialisasi tersebut.

PAN seolah sudah mempunyai *culture* perekrutan dan penyeleksian calon anggota legislatif karena memang PAN merupakan partai lama. Semakin lama partai itu dibangun, maka ia akan semakin mempunyai *culture*. Biasanya PAN mengadakan kerjasama dengan organisasi Islam besar yakni Muhammadiyah, yang biasanya Bacaleg telah memiliki banyak relasi.

Dalam hasil Rapat Pleno Rakernas I Partai Amanat Nasional di Jakarta, partai telah memutuskan aturan mengenai rekrutmen caleg untuk DPRD Provinsi PAN Periode 2009-2014, antara lain sebagai berikut:

a. Persyaratan Caleg

Persyaratan caleg dibagi menjadi dua, yakni syarat umum dan khusus. Syarat umum yang harus dimiliki Bacaleg tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara persyaratan khusus Bacaleg merupakan ketentuan yang harus dipenuhi Bacaleg agar diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Persyaratan khusus Bacaleg DPRD Provinsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Bacaleg tidak cacat moral dan terkait dengan tindakan kriminal.
- 2) Setiap Bacaleg DPRD Provinsi hanya boleh mencalonkan diri untuk satu Daerah Pemilihan (Dapil) dan tidak dibenarkan mencalonkan diri di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- 3) Caleg PAN terdiri dari caleg yang berasal dari kader PAN dan caleg yang berasal dari tokoh masyarakat yang seharusnya sejak dini terlibat aktif dalam program kemenangan pemilu.
- 4) Bacaleg kader partai harus mengikuti dan lulus Latihan Kader Amanat Madya (LKAM) yang merupakan jenjang pengkaderan formal yang dilakukan oleh Badan Pengkaderan DPW.
- 5) Apabila terjadi kekurangan jumlah bakal calon legislatif maka DPW dapat merekrut caleg dengan kriteria tertentu.
- 6) Bakal caleg harus memberikan kontribusi berupa dana atau sarana atribut partai bagi keperluan program kemenangan pemilu, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh partai.
- 7) Bacaleg harus mengikuti pembekalan Caleg dan Jurkam dalam rangka kemenangan pemilu yang dilaksanakan oleh DPW.



Syarat khusus poin ketiga yang ditetapkan untuk pencalonan bacaleg tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua warga negara Indonesia dapat secara otomatis mendaftar sebagai calon anggota DPRD Provinsi DIY. Bacaleg harus lebih dahulu mengadakan kerjasama dan ikut dalam kegiatan pemenangan partai, karena dalam proses seleksi juga diadakan skoring keaktifan caleg termasuk juga berapa lama ia aktif di kegiatan kepartaian.

b. Penanggungjawab, Kewenangan, dan Pelaksanaan Rekrutmen

Dalam pelaksanaan proses rekrutmen, monitoring, dan evaluasi caleg DPRD Provinsi, tanggungjawab sepenuhnya diserahkan kepada DPW masing-masing provinsi. Sedangkan untuk penetapan Bacaleg dan caleg DPRD Provinsi berada pada Pleno DPW dengan tetap merujuk kepada undang-undang yang berlaku. DPW memberikan kewenangan penuh kepada Ketua dan Sekretaris DPW untuk mengambil kebijakan dalam proses rekrutmen dan evaluasi caleg menyangkut hal-hal yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme dan peraturan yang ada (Rapat Pleno DPW). Apabila terjadi kelebihan daftar calon dalam satu Daerah Pemilihan maka Rapat Pleno DPW wajib untuk menentukan pengurangan Bacaleg dengan berpedoman pada hasil Tim Monitoring Kinerja Bacaleg. Pelaksanaan rekrutmen caleg DPRD Provinsi mengandalkan tiga tim yang telah dibentuk DPW yakni tim pendaftaran Bacaleg, tim Klarifikasi Bacaleg, dan tim monitoring Bacaleg. Anggota dari ketiga tim tersebut berasal dari kader yang tidak mencalonkan diri

sebagai Bacaleg dengan mendapatkan honorarium. Dengan begitu, ketiga tim tersebut bertanggungjawab kepada DPW dengan melaporkan hasil kerja berbentuk laporan kepada DPW.

c. Mekanisme rekrutmen dan pendaftaran Bacaleg

Rekrutmen Bacaleg dilaksanakan oleh panitia yang dinamakan KPPW (Komisi Pemenangan Pemilu Wilayah) yang terdiri dari tiga tim yakni tim pendaftaran Bacaleg, tim klarifikasi dan verifikasi data Bacaleg, tim monitoring Bacaleg. Orang-orang yang diperbolehkan mendaftar sebagai Bacaleg adalah orang yang berasal dari tiga sumber, yakni:

- 1) Anggota atau pengurus partai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA)
- 2) Tokoh-tokoh masyarakat yang direkrut sejak dini dan mendukung kemenangan Pemilu
- 3) Memperhatikan keberadaan Bacaleg Perempuan di nomor urut satu sampai dengan 30% dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah. Bacaleg perempuan diusahakan berada pada nomor urut satu untuk mendorong perempuan untuk berkiprah dan berkontribusi di dunia politik.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sekretaris KPPW pada bulan Juli tahun 2014, didapatkan pernyataan berikut terkait dengan presentase perempuan di kursi caleg DPRD Provinsi DIY:

Kami selalu memenuhi kuota 30% untuk caleg perempuan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu, akan tetapi biasanya sangat jarang perempuan yang benar-benar

*fight* dalam perebutan kursi anggota legislatif, sehingga terkadang kita tetap mencari caleg perempuan dan membantu ia dalam pengurusan ijin kepada suami misalkan, akan tetapi hal tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi perintah undang-undang saja. (hasil wawancara dengan Fani Satria, Sekretaris KPPW PAN DIY)

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa peran perempuan dalam partai tidak terlalu diperhitungkan, hanya semata-mata karena perintah undang-undang yang menghendaki kuota minimal 30% untuk caleg perempuan. Substansi demokrasi tidak pernah menempatkan perempuan maupun laki-laki dalam posisi yang berbeda, dengan kata lain tidak ada diskriminasi gender dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang politik pemerintahan.

d. Tata cara dan syarat pendaftaran

Dalam kegiatan pendaftaran, tim yang sudah dibentuk telah menetapkan tatacara dan syarat pendaftaran untuk Bacaleg yang hendak mendaftar, yaitu:

- 1) Mendaftarkan secara langsung kepada Tim Pendaftaran Bacaleg.
- 2) Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DPW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengambil formulir gratis yang telah disiapkan, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran tersebut kepada panitia dan menerima tanda bukti pendaftaran.
- 4) Membayar biaya administrasi yang akan ditetapkan kemudian.
- 5) Menyerahkan dokumen dan kelengkapan rangkap lima (5) yaitu:
  - a) Formulir pendaftaran sebagai Bakal Anggota Legislatif;

- b) Fotokopi Karu Tanda Anggota PAN
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d) Fotokopi Ijazah terakhir
- e) Daftar Riwayat Hidup
- f) Daftar kekayaan
- g) Fotokopi Sertifikat Latihan Kader Amanat Madya (LKAM)
- h) Fotokopi sertifikat pembekalan Caleg dan Jurkam PAN
- i) Pas foto 4 x 6 cm
- j) Fotokopi bukti pembayaran biaya administrasi pembayaran.
- k) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- l) Surat pernyataan bersedia membayar kontribusi dana wajib yang besarnya akan ditetapkan kemudian.

Apabila Bacaleg telah memenuhi semua persyaratan pendaftaran, maka semua data yang masuk akan diklarifikasi dan diverifikasi oleh Tim Klarifikasi dan Verifikasi Data Bacaleg. Adapun tugas dari Tim Klarifikasi dan Verifikasi Data Bacaleg secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Meneliti dan menilai keabsahan syarat dan kelengkapan administrasi Bacaleg sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyusun daftar Bacaleg berdasarkan nomor urut pendaftaran untuk Daerah Pilihannya masing-masing.

- 3) Bacaleg yang tidak memenuhi persyaratan akan diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi.

Setelah data selesai diklarifikasi dan diverifikasi oleh Tim, kemudian untuk tahap seleksi selanjutnya semua calon yang telah mendaftar tadi diwajibkan untuk membuat visi misi dengan menurunkan *platform* partai yang kemudian dituangkan dalam paper. Paper tersebut berkaitan dengan bagaimana Bacaleg tersebut berupaya mendeterminasi *platform* partai dalam kerja-kerja legislatif. Skoring mengenai paper Bacaleg dibuat oleh Tim. Ada beberapa kriteria pokok yang ditetapkan untuk menilai calon mana yang berhak lolos. Pertama, apakah Bacaleg masuk dalam instruktur partai. Kedua, keaktifan Bacaleg dalam berbagai kegiatan kepartaian, termasuk juga kontribusinya untuk partai. Ketiga, pemahaman Bacaleg tentang apa yang dia tulis, pemahaman dasar tentang *platform* partai, dan yang kelima pemahaman Bacaleg tentang mengartikulasikan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya DPW akan menetapkan daftar Bacaleg DPRD Provinsi yang lolos seleksi dan menyampaikan kepada DPD dan DPC sesuai daerah pemilihan. Dalam proses ini, tim benar-benar harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan Bacaleg perempuan di nomor urut satu (1) minimal 30%, dan apabila daerah pemilihan Bacaleg telah ditentukan, maka tidak dapat dilakukan pemindahan daerah pemilihan kecuali dengan pertimbangan kepentingan partai.

e. Monitoring Bacaleg

Kegiatan monitoring Bacaleg dilakukan oleh tim Monitoring Bacaleg yang mengacu pada petunjuk teknis yang telah dibuat oleh DPP PAN. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi kegiatan para caleg selama kampanye, meminimalisir konflik ditingkat teknis antar caleg partai satu dengan yang lainnya, apabila ada pelanggaran yang berat maka tim akan menjadi saksi dan mencari bukti-bukti. Monitoring Bacaleg bersifat kontinu, transparan dan adil.

Setelah Bacaleg mendapatkan daerah pilihannya masing-masing, maka DPW akan menerbitkan Surat Pengantar untuk kegiatan sosialisasi diri Bacaleg ke daerah pilihannya. Bacaleg menyelenggarakan program dan aktivitas untuk kemenangan pemilu di Dapil yang dibuktikan dengan isian formulir aktivitas kemenangan pemilu dan harus diketahui oleh DPD atau DPC yang bersangkutan untuk diserahkan kepada Tim Monitoring.

Bacaleg wajib menandatangani semua surat-surat pernyataan yang dibuat DPW dan melaksanakan kampanye pemilu dengan melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atas program dan perannya dalam memenangkan pemilu dengan partai dan atau dengan Bacaleg lain dalam satu Dapil. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dilaporkan secara rutin kepada Tim Monitoring DPW setiap tiga bulan sekali yang memuat laporan pelaksanaan aktivitas Kemenangan Pemilu di Dapil.

Dalam kegiatan kampanye Bacaleg, tentu terkait pula dengan kontribusi serta distribusi dana dan sarana. Dalam PAN, kontribusi Bacaleg terdiri atas dana dan sarana pemenangan pemilu berupa atribut partai yang didasarkan kepada program yang hendak dilaksanakan. Beban kebutuhan kampanye di Dapil dibagi secara proporsional dengan memperhatikan nomor urut Bacaleg melalui musyawarah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor urut satu memiliki beban kampanye lebih berat dan besar karena memang nomor urut satu biasanya diuntungkan dengan nomor urut tersebut. Biasanya, kader partai memiliki prioritas sendiri untuk mendapatkan nomor urut satu.

f. Evaluasi kinerja Bacaleg

Evaluasi kinerja Bacaleg dilakukan setiap hari dalam rapat harian DPW. Tim yang bertugas mengevaluasi kinerja Bacaleg adalah Tim Monitoring dan Evaluasi Bacaleg yang mengacu pada petunjuk teknis yang telah dibuat oleh DPP. Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi Bacaleg berupa scoring dan draft hasil proses rekrutmen.

g. Penetapan Bacaleg

Melalui rapat harian yang dilakukan oleh Tim Monitoring di DPW, dibahas mengenai laporan hasil keseluruhan yang kemudian disusun dengan urutan (ranking) Bacaleg. Selanjutnya untuk memutuskan dan menetapkan Bacaleg sesuai dengan urutannya dilakukan dalam rapat pleno DPW yang mekanisme pengambilan keputusannya diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Keputusan DPW diterbitkan dalam

bentuk Surat Keputusan (SK) DPW yang selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi.

Dalam penyusunan nomor urut Bacaleg, diprioritaskan terlebih dahulu untuk Bacaleg kader partai, baru kemudian Bacaleg tokoh masyarakat. Surat Keputusan yang diterbitkan DPW bersifat mengikat, dan apabila ada perubahan daftar Bacaleghal tersebut hanya dimungkinkan atas dasar ketentuan KPUD Provinsi dan/ atau adanya masukan obyektif dan otentik yang berkaitan dengan integritas dan moralitas Caleg yang memungkinkan berpengaruh negatif terhadap citra partai. Perubahan Bacaleg menjadi Caleg ditetapkan melalui Rapat Pleno DPW. Penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan pada pertimbangan kebijakan partai dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nomor urut calon dijadikan pedoman dasar bagi penetapan Caleg terpilih.
- 2) Caleg yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) langsung ditetapkan menjadi anggota legislatif.
- 3) Bila Caleg kader partai tidak memenuhi BPP maka penentuan Caleg terpilih merujuk AD pasal 21 ayat (5) dan (6) yaitu:

Ayat (5): Anggota PAN yang menjadi anggota legislatif terpilih adalah orang yang memperoleh suara terbanyak dalam setiap tingkatan, yang selanjutnya akan diatur dalam pedoman organisasi.

Ayat (6): Ketentuan sebagaimana ayat 5 diatas dapat dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.



Penentuan BPP menggunakan rumus jumlah suara per Dapil dibagi dengan jatah suara per dapil, sehingga BPP setara dengan harga satu kursi mutlak per Dapil untuk pemilihan legislatif. Sehingga apabila caleg memenuhi BPP dapat langsung ditetapkan menjadi anggota legislatif sesuai dengan poin kedua.

## **2. Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Gerindra**

Pola rekrutmen yang digunakan partai Gerindra secara umum adalah rekrutmen terbuka. Hal ini berkaitan dengan dibukanya peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkesempatan menjadi caleg dari partai Gerindra. Tetapi disisi lain, partai juga menerapkan sistem rekrutmen tertutup dengan menggunakan *stelsel pasif*, biasanya tokoh yang ditunjuk untuk menjadi caleg merupakan kader partai yang sudah dipertimbangkan kemampuan dan loyalitasnya terhadap partai Gerindra. Untuk caleg kader itu sendiri, mereka tetap harus melalui tahap seleksi yang sama dengan caleg tokoh masyarakat, jadi semua tetap diperlakukan sama.

Partai Gerindra membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bergabung dan berjuang bersama partai Gerindra. Usaha sosialisasi yang dilakukan pun beraneka ragam, mulai dari website dengan *take line* “Mengajak putera-puteri terbaik bangsa untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam pemilihan umum 2014 demi mewujudkan perubahan Indonesia”. Selain dari website, sosialisasi juga dilakukan melalui media massa cetak maupun elektronik.

Gerindra tidak menentukan secara spesifik mengenai presentase perbandingan antara caleg kader maupun caleg tokoh masyarakat, semua murni didasarkan kepada kemampuan, kualitas, dan loyalitas Bacaleg terhadap partai Gerindra, akan tetapi untuk caleg kader memang memiliki prioritas sendiri untuk mendapatkan nomor urut satu. Penempatan nomor urut satu bagi para caleg ditentukan dengan suara terbanyak, kader atau anggota tidak dipermasalahkan karena semua tergantung kepada kemampuan dan suara yang mereka dapatkan. Akan tetapi, memang bagi caleg kader memiliki sedikit prioritas untuk mendapatkan nomor urut satu.

Dalam kegiatan rekrutmen Bacaleg, partai Gerindra menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum yang telah mengatur secara umum mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan partai politik dalam perekrutan Bacaleg. Selain dengan undang-undang tersebut, partai juga mengacu pada AD/ ART partai Gerindra. Partai membentuk suatu panitia yang bertugas dalam proses rekrutmen yang bernama Badan Seleksi Bacaleg, sedangkan panitia yang mengatur kampanye dan pembagian Dapil bernama Badan Pemenangan Pemilu.

Aturan teknis mengenai perekrutan Bacaleg partai Gerindra memang belum dibukukan secara resmi karena partai Gerindra tergolong partai baru dan belum pernah melaksanakan Kongres sehingga untuk aturan secara teknis masih berpegang pada instruksi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Gerindra yang berkedudukan di Jakarta. Berikut merupakan syarat Bacaleg yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai caleg partai Gerindra:

- 1) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- 5) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; diutamakan Sarjana (S1);
- 6) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 7) Bersedia menjadi anggota partai Gerindra;
- 8) Patuh dan taat pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Manifesto Perjuangan dan peraturan-peraturan serta ketetapan partai Gerindra;
- 9) Bersedia mengikuti pendidikan dan latihan kader partai Gerindra;
- 10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau lebih;
- 11) Sehat jasmani dan rohani;
- 12) Terdaftar sebagai pemilih;

- 13) Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota partai Gerindra;
- 14) Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- 15) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;
- 17) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- 18) Dicalonkan hanya di satu (1) daerah pemilihan.

Untuk alur pendaftaran Bacaleg secara teknis dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DIY mengisi formulir pernyataan pendaftaran serta menyerahkan kelengkapannya di tempat pendaftaran secara langsung tanpa diwakilkan.
- 2) Membayar formulir pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3) Tempat pendaftaran adalah di kantor DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Gerindra DIY.
- 4) Pada saat pendaftaran, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi wajib membawa kelengkapan administratif sebagai berikut:
  - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b) Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
  - c) Menyerahkan CV (Curriculum Vitae);
  - d) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - e) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra;
  - f) Apabila masih terdaftar sebagai anggota partai lain, wajib menyerahkan salinan surat pengunduran diri dari partai lain;
  - g) Syarat-syarat lain yang akan ditentukan oleh KPU akan diberitahukan setelah ada ketetapan KPU.

Setelah mendaftar, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran. Setelah itu Bacaleg akan dipanggil

kembali untuk mengikuti berbagai tes untuk mendapatkan skoring atas potensi yang ia miliki. Badan seleksi melakukan tes yang berupa test potensi akademik, test psikologis, dan kegerindraan dan akan dilanjutkan dengan wawancara umum yang terkait tentang ketugasan dewan dan nasionalisme.

### **3. Perbedaan Pola Rekrutmen Antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)**

PAN dan partai Gerindra memiliki persamaan dan perbedaan dari beberapa aspek yang telah dibahas diatas. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat setiap partai politik memiliki kekhasan masing-masing yang tidak dapat di salahkan karena perbedaan-perbedaan tersebut. Semua memiliki sisi positif dan negatif sehingga dalam perbandingan ini diharapkan dapat mengambil sisi positifnya dari masing-masing perbedaan yang ada. Pada tabel 2 dapat dilihat persamaan PAN dan Gerindra dari berbagai aspek terkait dengan rekrutmen Bacaleg yang mereka terapkan, dan pada tabel 3 dapat dilihat perbedaan pola rekrutmen caleg DPRD Provinsi antara PAN dan Gerindra.

**Tabel 2. *Persamaan Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Antara DPD Gerindra dan DPW PAN DIY Tahun 2014***

No	Aspek	Keterangan
1.	Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan rekrutmen	Sama-sama menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.	Pola rekrutmen caleg yang digunakan	Sama-sama menggunakan pola rekrutmen campuran, yakni rekrutmen terbuka dan tertutup. Sistem yang dipakai sama-sama <i>stelsel aktif</i> dan <i>stelsel pasif</i> .
3.	Kegiatan evaluasi	Kegiatan evaluasi diadakan setiap hari dalam rapat harian.
4.	Persentase perbandingan caleg kader dan non-kader	Variatif, atau tidak ditentukan secara mutlak.
5.	Kaderisasi	Sama-sama mewajibkan caleg untuk mengikuti pembekalan dasar dan kaderisasi berjenjang.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk pedoman peraturan rekrutmen secara umum, PAN dan Gerindra sama-sama menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan menerapkan pola rekrutmen terbuka untuk umum dengan mekanisme lebih lanjut diatur oleh partai masing-masing. Pelaksanaan kaderisasi berjenjang merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dalam rangka mempersiapkan sekaligus meningkatkan kualitas kader sebagai calon-calon anggota dewan bukan hanya mewakili partai, akan tetapi mewakili masyarakat luas. Seorang kader dituntut untuk dapat menguasai hal-hal teknis maupun non-teknis mengenai ketugasan dewan, dapat secara baik mengagregasi kepentingan publik, serta memahami *platform* maupun manifesto perjuangan partai kedalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Selain persamaan pola rekrutmen PAN dan Gerindra tersebut, masih terkait dengan pola rekrutmen yang PAN dan Gerindra lakukan tentu ada pula perbedaan dari keduanya. Perumusan perbedaan pola rekrutmen kedua partai didasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 3. Perbedaan pola rekrutmen Caleg DPRD Provinsi antara Partai Gerindra dan PAN DIY Tahun 2014**

No	Aspek	PAN	Gerindra
1.	Sumber Bacaleg DPRD Provinsi DIY	Hanya merekrut bacaleg kader, perekrutan bacaleg non-kader sangat jarang dilakukan.	Merekrut bacaleg baik kader maupun non-kader.
2.	Rekrutmen tertutup	Dilakukan dengan penunjukkan/ penawaran pada kader partai secara langsung.	Dilakukan dalam bentuk surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan
3.	Rekrutmen terbuka	Semua masyarakat berkesempatan untuk dapat menjadi caleg PAN, akan tetapi harus mengikuti kaderisasi berjenjang terlebih dahulu	Semua masyarakat berkesempatan untuk dapat menjadi caleg partai Gerindra asalkan lolos semua tahap seleksi bacaleg.
4.	Jenjang Kaderisasi	Pelatihan Kader Amanat Dasar (untuk anggota pemula), Pelatihan Kader Amanat Madya (untuk caleg kabupaten/ kota dan propinsi), Pelatihan Kader Utama (untuk caleg pusat)	Kader penggerak, kader pratama, kader muda, kader madya, kader utama, dan kader manggala.
5.	Waktu Pelatihan Bacaleg Non-Kader	Fleksibel, dapat sebelum atau sesudah Bacaleg ditetapkan menjadi caleg namun tetap bersifat wajib.	Harus diikuti sebelum ia ditetapkan menjadi caleg partai Gerindra.
6.	Kelengkapan pendaftaran	Menyerahkan laporan daftar kekayaan Bacaleg	Tidak perlu menyerahkan daftar kekayaan Bacaleg
7.	Seleksi awal	Dengan mewajibkan Bacaleg membuat paper tentang visi misi dengan menurunkan <i>platform</i> partai.	Dengan test kegerindraan, wawancara umum tentang ketugasan dewan, dan test psikologis.
8.	Media sosialisasi kepada masyarakat	Menggunakan pamflet yang ditempel di kantor DPW PAN dan DPC.	Menggunakan media massa cetak maupun elektronik, membuka pengumuman di <a href="http://www.gerindra.or.id">www.gerindra.or.id</a>
9.	Posisi caleg perempuan	PAN memprioritaskan caleg kader perempuan untuk mendapatkan nomor urut 1, dan selalu memenuhi kuota 30% sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu	Gerindra tidak membedakan persentase caleg perempuan dan laki-laki, semua sama berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Dengan kata lain, persentase caleg perempuan tidak harus 30%.



Tabel perbedaan tersebut menunjukkan bahwa PAN hanya merekrut bacaleg yang sejak dini turut mendukung kemenangan pemilu PAN dan aktif dalam partai. Hal tersebut didukung oleh kutipan wawancara dengan Wakil Ketua DPW PAN DIY yaitu “semua caleg PAN itu kader, jika tidak kita dapat juga merekrut mantan-mantan lurah tetapi itu sangat jarang dilakukan.” (hasil wawancara dengan Paryanto, Wakil Ketua DPW PAN DIY pada bulan Juli tahun 2014). Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa PAN tidak sembarang merekrut bacaleg yang sebelumnya belum pernah aktif dalam kegiatan kepartaian di PAN. Sehingga tidak semua bacaleg yang hendak menjadi caleg dapat lolos begitu saja karena dalam proses seleksi pun dinilai juga keaktifan dan kontribusinya terhadap PAN, semakin aktif ia di organisasi maka kesempatan untuk lolos menjadi caleg semakin besar. Hal ini juga terkait dengan pendidikan politik yang PAN usahakan terhadap calon legislatif yang diusungnya, karena itu semua caleg PAN mayoritas memang orang-orang yang sudah benar-benar memiliki pengalaman berpolitik dan aktif dalam partai.

Dengan menerapkan pola rekrutmen seperti ini, caleg PAN rata-rata telah memiliki kemampuan baik secara teknis maupun non-teknis tentang ketugasan dewan karena dalam materi kegiatan kaderisasi yang dilakukan untuk anggota maupun kadernya PAN mencakup juga hal-hal terkait ketugasan dewan. Selain itu, dengan terbiasanya mereka terhadap kegiatan organisasi partai, tentu secara langsung ataupun tidak langsung mereka telah melakukan pendidikan politik. Dengan organisasi, seseorang akan belajar

bagaimana mengartikulasikan kepentingannya dalam sebuah forum diskusi, bagaimana ia harus belajar mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan umum, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, dengan menerapkan pola rekrutmen tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi partai. Seperti dikutip dari wawancara kepada sekretaris DPW PAN DIY yaitu: “terkadang kami mengalami kekurangan jumlah caleg, sehingga terkadang kami terpaksa melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kuota sesuai dengan kursi yang dibutuhkan meskipun nanti orang-orang yang dicalonkan tidak *fight* dalam pemilu” (hasil wawancara dengan Fani Satria pada bulan Juli tahun 2014). Dari kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa terkadang jumlah caleg yang lolos tidak sesuai dengan target (sebanyak kursi yang diperebutkan). Caleg tidak sepenuhnya *fight* dalam pemilu maksudnya adalah caleg tidak melakukan kegiatan seperti lazimnya caleg dalam pemilu, seperti melakukan kampanye, seleksi, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan dampak yang biasanya terjadi dalam proses rekrutmen caleg PAN.

Sedangkan untuk DPD Gerindra, semua masyarakat dari berbagai lapisan dapat secara otomatis mendaftar sebagai bacaleg partai Gerindra dan memiliki kesempatan yang sama, semua didasarkan atas hasil seleksi terhadap kemampuan dan loyalitas terhadap partai. Pola rekrutmen seperti ini memang tidak akan memungkinkan partai mengalami kekurangan jumlah caleg seperti yang dialami PAN, akan tetapi disisi lain pola seperti ini cenderung lebih beresiko untuk mendapatkan caleg yang tidak sesuai harapan.

Dengan kata lain, pengalaman organisasi termasuk poin penting untuk memilih seorang caleg yang hendak mewakili partai. Pola rekrutmen caleg DPRD partai Gerindra di Provinsi DIY juga lebih membuka peluang untuk terjadinya *money politik* oleh para caleg, dimana mereka hanya mengandalkan uang untuk bisa menjadi anggota legislatif terpilih.

### **C. Upaya Partai Gerindra dan PAN Untuk Meningkatkan Kualitas Caleg DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penurunan kualitas anggota dewan perwakilan saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik yang bertugas merekrut Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang nantinya apabila terpilih dalam Pemilu akan menjadi anggota legislatif yang mewakili sekian banyak aspirasi masyarakat. Anggota legislatif harus dituntut untuk memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Menurut Miriam Budiardjo (2008), apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Hal tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran kader dalam sebuah partai politik, maka kualitas dan kapabilitas seorang kader memang harus diutamakan. Maka dari itu muncul istilah kaderisasi yaitu suatu kegiatan partai politik dalam upaya membentuk kader-kader yang berkualitas karena kader-kader partai dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pengurus partai, bakal calon anggota legislatif, bakal calon presiden dan wakil presiden, dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain proses kaderisasi dalam upaya peningkatan kualitas kadernya, partai politik juga memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik

kepada masyarakat luas. Hal ini terkait dengan bacaleg yang diajukan partai politik tidak hanya berasal dari kader partai, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat (caleg non-kader). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 12 menjelaskan fungsi partai politik terkait dengan pendidikan politik bukan saja untuk kadernya, tetapi juga untuk masyarakat luas.

## **1. Kaderisasi PAN**

Kader PAN adalah komponen utama anggota partai yang selalu siap berjuang dalam kondisi apapun untuk mewujudkan tujuan partai. Seorang kader harus mempunyai kemampuan untuk mendorong terjadinya perubahan, pembaharuan dan peningkatan kinerja dalam partai/ organisasi serta sekaligus dapat berfungsi sebagai penggerak/ pemimpin yang adil dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup partai.

Oleh karena itu, pengkaderan PAN harus:

- 1) Mampu menciptakan sistem manajemen kaderisasi yang efisien dan efektif didalam suasana yang dinamis-kolegial, serta mampu menumbuhkan semangat juang bangsa yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa bagi para kadernya.
- 2) Mempunyai landasan pokok ideologis, institusi dan konstitusional sebagai bagian integral pembangunan bangsa.
- 3) Mempunyai arah membina dan menempa anggota kader berwawasan kebangsaan yang diarahkan untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas, jati diri, intelektualitas/ rasional, professional, kebangsaan, kemampuan antisipasi ke masa depan

dan kepekaan sosial serta kepemimpinan yang mantap yang dipersiapkan untuk berbagai bidang (eksekutif, legislatif dan organisasi partai).

- b. Memperkokoh komitmen Partai Amanat Nasional terhadap dasar negara, wawasan kebangsaan.
- c. Mempertebal mental, kejuangan dan kepeloporan dalam mewujudkan reformasi total menuju masyarakat Indonesia baru.
- d. Meningkatkan semangat berkorban, tanggungjawab dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan.
- e. Meningkatkan kemampuan mendidik, membangun kader secara berkesinambungan dan berwawasan serta bernuansa politik yang optimal.

Dengan demikian, maka kaderisasi Partai Amanat Nasional harus diupayakan untuk menciptakan kader-kader yang berwawasan kebangsaan dengan sasaran kualitatif yang diharapkan dapat memberi pengaruh kepada sistem regenerasi yang mapan serta didalamnya terkandung semangat reformasi menuju masyarakat yang dicita-citakan. Kader PAN harus kreatif untuk menemukan berbagai hal yang betul-betul diperlukan rakyat. Memahami hal-hal yang dicintai rakyat, dan hal apa yang dibenci rakyat baik tingkat nasional, regional, maupun lokal.

Sebagai partai yang memiliki sifat moral agama yang *inklusif* (terbuka) maka PAN berjuang untuk dapat dicintai rakyat dan memperoleh dukungan penuh untuk berjuang dari rakyat. Upaya PAN agar dicintai rakyat adalah

dengan cara menerapkan asas serta *platform* partai dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang bertumpu pada pengabdian sosial kemasyarakatan sebagai syarat utama untuk mencapai kemenangan. Program pengabdian tersebut harus didukung oleh perilaku dan tindakan politik para kader terutama yang duduk di legislatif dan eksekutif agar peka terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat dan peduli untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi rakyat.

PAN berusaha membangun sistem organisasi yang modern sebagai salah satu bentuk perjuangan internal yang sangat penting. Sistem organisasi utamanya menyangkut elemen struktur, sumberdaya manusia, budaya, institusi dan aturan main, serta unsure lingkungan eksternalnya. Sementara sifat modern yang melekat pada organisasi ditandai oleh manajemen pengelolaan yang lebih baik transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi, aturan main yang rasional, etika politik yang bermartabat, terbuka, transparan dan berorientasi pada hasil kemenangan dalam setiap pemilu. Perjuangan internal PAN yang utama adalah menjadikan dirinya sebagai organisasi dengan sistem dan tatanan institusi yang kuat. PAN harus diarahkan menjadi organisasi politik dengan sistem yang kuat dalam tatanan kelembagaan yang sehat, terbuka, adil, transparan dan partisipatif. Tatanan institusi ini diperlukan karena tujuan berorganisasi secara kolektif harus diwujudkan dengan usaha yang mengerahkan seluruh sumberdaya kolektif pula. Dengan tatanan yang sehat tersebut, maka kehidupan organisasi partai bisa diatur secara lebih baik, lebih adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Fungsi ini

bersifat universal dimana ada suatu komunitas organisasi, maka institusi menjadi tiang penyangga kebersamaan tersebut. Organisasi yang berhasil membangun institusi dengan baik, maka sistem internalnya menjadi sehat dan lingkungannya menjadi lebih kondusif. Organisasi memerlukan institusi, jika institusinya baik maka organisasi akan berjalan baik pula. Usaha untuk memperbaiki organisasi juga dapat dipastikan hanya tergantung pada perbaikan dan pengembangan institusinya (*institution building*).

Terkait dengan proses rekrutmen yang dilakukan, para caleg wajib mengikuti pelatihan berjenjang yang diadakan partai, mulai dari kader amanat dasar (untuk anggota pemula), madya (untuk caleg kabupaten/ kota dan propinsi), dan utama (caleg pusat). Selain diadakan pelatihan, diadakan pula *workshop* dan pembekalan dasar bagi para caleg pemula. Apabila Bacaleg belum mengikuti pelatihan setelah ia ditetapkan menjadi caleg PAN, maka ia harus menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan, setelah ia ditetapkan menjadi caleg PAN karena pelatihan ini wajib diikuti. Pelatihan ini membutuhkan setidaknya dua hari efektif karena Bacaleg harus benar-benar memahami AD/ ART PAN dan *platform* partai. Pelatihan meliputi juga tiga tugas pokok legislatif, yakni legislasi, budgeting (hak anggaran, membuat peraturan daerah) dan pengawasan. Diharapkan, dengan adanya pelatihan tersebut, anggota dewan yang baru tidak mengulangi kesalahan dewan yang lama. Dalam hal penganggaran daerah, kader partai di legislatif harus benar-benar berhati hati. Untuk urusan yang bersifat teknis terkait ketugasan legislatif (seperti bagaimana menyusun RUU, hak-hak pemerintahan daerah

semisal aturan denda,dan sebagainya), tim biasanya menggunakan cara simulasi (misal membandingkan perda daerah lain dengan perda Yogyakarta) untuk melatih caleg mengenai hal teknis, karena memang waktu yang tersedia cukup singkat.

Waktu yang relatif singkat merupakan hambatan partai untuk melakukan kaderisasi secara matang sebelum seleksi bacaleg dilakukan, akan tetapi sudah seharusnya KPPW merancang secara baik saat proses seleksi berlangsung. Seperti dikutip dalam sebuah wawancara pada bulan Juli tahun 2014 dengan pengurus Partai Amanat Nasional:“jika kita hendak melakukan seleksi secara ketat, mungkin tidak ada yang lolos seleksi menjadi caleg.” (hasil wawancara dengan Sekretaris KPPW PAN DIY). Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pola seleksi bacaleg yang dilakukan masih sekedar formalitas belaka, sehingga perlu kesadaran bahwa kualitas bacaleg merupakan hal pokok yang harus diperhatikan sebelum ia menjadi caleg bahkan anggota legislatif. Jika pihak partai politik belum memiliki kesadaran sepenuhnya, maka perbaikan kualitas dan kinerja anggota legislatif sangat sulit dilakukan meskipun telah dilakukan kaderisasi sebelum proses seleksi.

Kaderisasi memang belum menjamin dapat memperbaiki kualitas dan loyalitas caleg partai politik, akan tetapi setidaknya upaya kaderisasi dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan caleg dan kader terhadap tugas-tugas legislasi sehingga diharapkan ia akan lebih menyadari bahwa perannya dalam ketugasan dewan sangat penting bagi kemajuan bangsa. Dengan begitu



ia akan memaksimalkan peran dan kinerjanya dalam dewan legislatif dan berusaha menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.

## **2. Kaderisasi Partai Gerindra**

Salah satu tugas partai Gerindra yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah mempersiapkan kader-kader partai yang terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan. Untuk mengikuti kaderisasi partai Gerindra, langkah pertama harus menjadi anggota partai Gerindra terlebih dahulu. Khusus untuk para Bacaleg (bakal calon legislatif), kaderisasi memang menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh Bacaleg yang juga dijadikan sebagai syarat pendaftaran untuk mencalonkan diri.

Untuk keanggotaan partai Gerindra telah diatur dalam AD/ ART, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota partai, antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
- 3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.
- 4) Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

Setelah menjadi anggota dari partai Gerindra, maka akan secara otomatis memperoleh hak dan kewajiban anggota partai, kewajiban anggota partai antara lain sebagai berikut:

- 1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga.
- 2) Mematuhi dan melaksanakan keputusanKongres dan ketentuan partai sertaperaturanpartai.
- 3) Mengamankan dan memperjuangkankebijakan partai.
- 4) Membela kepentingan partai dari setiap usahadan tindakan yang merugikan partai.
- 5) Menghadiri rapat-rapat dan kegiatan partai.
- 6) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakanprogram perjuangan partai.
- 7) Membayar Iuran Anggota.

Hak Anggota partai Gerindra adalah:

- 1) Memperoleh perlakuan yang sama.
- 2) Mengeluarkanpendapat baik lisan maupuntulisan.
- 3) Memilih dan dipilih.
- 4) Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
- 5) Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader.
- 6) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

Kader partai Gerindra adalah anggota partai Gerindra yang merupakan tenaga inti dan penggerak partai. Pembentukan kader partai Gerindra dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader. seleksi kader didasarkan pada:

- 1) Mental ideologi.

- 2) Penghayatan terhadap visi dan misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Manifesto Perjuangan Partai, Prestasi.
- 3) Dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
- 4) Kepemimpinan.
- 5) Militansi dan mandiri.

Strata kader partai gerindra adalah kader penggerak, pratama, muda, madya, utama, dan yang paling tinggi adalah kader manggala. Pembentukan kader partai Gerindra dimaksudkan untuk menjadi:

- 1) Calon pengurus partai
- 2) Bakal calon anggota DPR dan DPRD.
- 3) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4) Bakal calon presiden dan wakil presiden.

Pengkaderan di partai tidak sekedar transfer sebuah pengetahuan tapi transfer ideologi. Partai Gerindra melakukan kaderisasi melalui sayap-sayap partai seperti Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gembira), Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Kristen Katolik Indonesia Raya (KIRA), Gerakan Mahasiswa Sanatadharma (GEMASADHARMA), dan berbagai sayap partai lainnya. Selain itu, partai Gerindra memiliki tempat di Bogor bernama Hambalang yang digunakan sebagai pusat kaderisasi partai untuk anggota, kader, maupun saksi.

### **3. Pendidikan Politik Untuk Masyarakat**

Sesuai dengan undang-undang, partai politik memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik terhadap anggotanya dan masyarakat. Partai

Gerindra dan Partai Amanat Nasional melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dengan cara yang berbeda. Partai Gerindra melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui sayap-sayap partai yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun secara rutin saat bantuan politik dari pemerintah lewat Kantor Kesbanglinmas (Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat) diberikan. Hal ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan Gerindra untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dalam upaya memperbaiki kualitas dan jiwa nasionalisme bacaleg yang nantinya hendak menjadi caleg.

Partai Amanat Nasional juga berupaya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas Bacaleg. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya sekolah reguler bidang politik bernama KIBAR (Komunitas Indonesia Baru) yang berpusat di Jakarta. Sekolah ini dikembangkan di berbagai kota, dalam hal ini DPW PAN DIY juga aktif mengembangkan KIBAR di Yogyakarta.

Dengan pembahasan diatas, maka dapat dilihat secara garis besar terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan partai Gerindra dan PAN di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Upaya Partai Gerindra dan PAN untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatif**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>PAN</b>	<b>Gerindra</b>
1.	Anggota dan Kader Partai	1. PAN mewajibkan anggota dan kadernya untuk mengikuti kaderisasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kader amanat dasar (untuk anggota pemula), kader amanat madya (untuk caleg kabupaten/ kota dan provinsi), dan kader amanat utama (caleg pusat).	1. Partai Gerindra mewajibkan anggota dan kadernya untuk mengikuti kaderisasi yang dirancang sedemikian rupa dan dilakukan secara berjenjang dan terus menerus. Partai Gerindra memiliki tempat yang bernama Hambalang sebagai pusat dari kegiatan kaderisasi anggota dan kadernya. Disana sekaligus dijadikan tempat pelatihan saksi-saksi partai Gerindra. biasanya kaderisasi ini dilakukan sebanyak satu bulan satu kali. Selain itu, upaya kaderisasi juga dilakukan melalui sayap-sayap partai seperti KIRA, GEMASDHARMA, dll.
2.	Masyarakat umum	Pembangunan sekolah politik reguler bernama KIBAR (Komunitas Indonesia Baru) yang berpusat di Jakarta, yang dikembangkan juga di Yogyakarta dan kota-kota lainnya. Dengan adanya sekolah KIBAR, diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional.	Pelaksanaan program-program terkait pendidikan politik masyarakat luas yang biasanya diadakan sebanyak dua kali dalam setahun. Program tersebut dilakukan secara teknis melalui sayap-sayap partai Gerindra.

#### **D. Kesesuaian Pola Rekrutmen Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra dengan Demokrasi Prosedural**

Demokrasi prosedural merupakan demokrasi yang bercirikan adanya perubahan kepemimpinan melalui Pemilu yang berlangsung jujur, bebas, terbuka, dan melibatkan massa pemilih yang universal tanpa pembedaan ras, gender, agama maupun suku. Selain itu, demokrasi prosedural secara umum dapat dikatakan sebagai demokrasi yang sesuai dengan prosedur (aturan), dalam konteks ini yang dimaksud dengan aturan atau prosedur adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi prosedural adalah demokrasi yang mengutamakan kebebasan mengeluarkan pendapat untuk warga negaranya, akan tetapi masih dalam lingkup atau harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara.

Demokrasi menghendaki segala rekrutmen dan kontrol politik yang ada dilakukan secara terbuka, sehingga semua warga negara dapat berperan aktif dalam mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan. Telah dibahas diatas mengenai pola rekrutmen yang dijalankan partai Gerindra dan PAN, termasuk juga upaya kedua partai dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas caleg yang mereka ajukan di DPRD Provinsi. Berdasarkan dengan apa yang telah dibahas diatas, maka kesesuaian pola rekrutmen dengan demokrasi prosedural secara lebih lanjut dapat dibahas sebagai berikut:

##### **1. Kesesuaian pola rekrutmen partai Gerindra dengan demokrasi prosedural.**

Secara umum pola rekrutmen yang Gerindra gunakan adalah terbuka, hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya sosialisasi yang partai lakukan

untuk memberitahu serta mengajak berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu legislatif tahun 2014 ini. DPD Gerindra juga membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi tanpa membedakan ras, suku, agama dan *gender*. Hal tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi prosedural yang mengutamakan *political equality* sekaligus cerminan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 12. Untuk rekrutmen tertutup, DPD hanya mengeluarkan dukungan dalam bentuk surat rekomendasi yang apabila orang yang ditunjuk bersedia mengajukan diri sebagai calon legislatif maka surat rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Dalam pemilu tahun 2014 ini, partai Gerindra berhasil mengajak 200 bakal calon anggota DPRD Provinsi, tentu saja jumlah tersebut sangat melebihi target yang ditetapkan partai sehingga dilakukan pola seleksi sedemikian rupa untuk menetapkan siapa saja yang lolos menjadi caleg (calon anggota legislatif) DPRD Provinsi periode tahun 2014 hingga 2019. Dari 200 bacaleg yang mendaftar terpilih 55 caleg yang lolos seleksi yang ditetapkan menjadi DCS (Daftar Calon Sementara), kemudian berkurang 1 (satu) bacaleg karena berdasarkan laporan masyarakat diketahui bahwa bacaleg tersebut masih memiliki masalah hukum yang belum terselesaikan. Dari 54 (lima puluh empat) caleg yang lolos seleksi, berdasarkan latar belakang pendidikan terakhirnya sebanyak 6 (enam) caleg berpendidikan Magister, 17 (tujuh belas) caleg berpendidikan Sarjana, 1 (satu) caleg berpendidikan diploma, dan 30 (tiga puluh) caleg berpendidikan setara dengan Sekolah

Menengah Atas (SMA). Tahun 2014, partai Gerindra berhasil menempatkan tujuh wakilnya di DPRD Provinsi dengan 6 (enam) caleg berasal dari kader partai, dan satu caleg berasal dari caleg non-kader.

Dengan fenomena jumlah bacaleg yang melebihi target pada rekrutmen caleg tahun 2014 ini, hal tersebut merupakan cerminan apresiasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap partai Gerindra sebagai partai baru yang diharapkan dapat membawa berbagai perubahan kearah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain cara sosialisasi yang dilakukan, kemudian syarat-syarat bacaleg yang tergolong mudah sehingga semua masyarakat dari berbagai macam latar belakang pendidikan tidak mengalami kesulitan saat pendaftarannya.

2. Kesesuaian pola rekrutmen PAN dengan demokrasi prosedural.

DPW PAN secara umum menggunakan pola rekrutmen terbuka dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Akan tetapi, tidak semua warga negara Indonesia dapat secara otomatis mendaftarkan diri sebagai caleg untuk mewakili PAN. Dalam hasil Rakernas yang telah dilakukan, terdapat instruksi dari pusat bahwa bacaleg DPRD Provinsi haruslah memang tokoh yang sejak dini direkrut dan mendukung kemenangan pemilu, sehingga sebelum mendaftarkan diri bacaleg haruslah terlebih dahulu memiliki pengalaman politik melalui keaktifannya dalam partai.



Demokrasi prosedural menekankan kepada persamaan hak warga negara dan sistem rekrutmen politik yang terbuka. Ini berarti semua warga negara Indonesia berhak mengikuti dan mendaftarkan diri sebagai bacaleg dari partai politik manapun, termasuk PAN. PAN menghormati hak warga negara seluruhnya yang hendak mendaftar sebagai caleg, akan tetapi mekanisme seleksi partai harus tetap dijalankan selama masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Tahun 2014 ini, DPW PAN DIY telah menetapkan sebanyak 55 caleg DPRD Provinsi dari tujuh daerah pemilihan. Dilihat dari latar belakang pendidikan terakhirnya, sebanyak 36 (tiga puluh enam) caleg berpendidikan Sarjana, 4 (empat) caleg berpendidikan magister, 1 (satu) caleg berpendidikan diploma (akademi), dan 14 (empat belas) caleg berpendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari 55 caleg yang lolos seleksi, telah terpilih melalui pemilu legislatif sebanyak 8 (delapan) caleg yang semuanya berpendidikan terakhir sarjana dan dalam riwayat organisasi kepartaian, seluruh caleg terpilih merupakan caleg yang menduduki posisi-posisi strategis dalam partai.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: “*Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*” yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta antara Partai Gerindra dengan PAN.

Ada beberapa perbedaan pokok pola rekrutmen calon legislatif DPRD partai Gerindra dan PAN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. Pada PAN seleksi awal Bacaleg setelah pendaftaran yaitu menggunakan strategi pembuatan visi misi berwujud *paper* oleh Bacaleg dengan menurunkan *platform* partai. Kemudian kriteria penilaian paper digunakan untuk menyatakan Bacaleg tersebut lolos atau tidak menjadi DCS (Daftar Calon Sementara), sedangkan di partai Gerindra seleksi awal menggunakan test kegerindraan, wawancara umum tentang ketugasan dewan, dan tes psikologis.
- b. Untuk penggunaan media sosialisasi eksternal, PAN menggunakan pamflet dan edaran pengumuman untuk masyarakat yang ditempel di kantor DPW PAN DIY dan beberapa tempat lain, sedangkan untuk partai Gerindra menggunakan website resmi partai Gerindra di

<http://partaigerindra.or.id>. Selain menggunakan website resmi, mereka juga membuka pengumuman di media massa cetak maupun elektronik.

- c. PAN hanya merekrut Bacaleg kader, karena bacaleg PAN haruslah terlebih dahulu mengadakan kerjasama dan turut mendukung kemenangan partai dalam waktu yang relatif lama (dengan kata lain harus menjadi kader partai terlebih dahulu). Sedangkan partai Gerindra merekrut Bacaleg baik kader maupun non-kader, Bacaleg non-kader (tokoh masyarakat) boleh berasal dari orang yang sebelumnya belum pernah mengadakan kerjasama dengan partai Gerindra, asalkan memang Bacaleg memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap partai.
- d. Posisi caleg perempuan di Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki prioritas berada di nomor urut satu jika ia didukung oleh perannya sebagai kader partai, jika tidak maka tetap berdasarkan skoring yang didapatkan caleg. Pada partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki.

Selain berbagai perbedaan diatas, terdapat pula beberapa persamaan dari pola rekrutmen yang digunakan. Persamaan tersebut ada pada aspek peraturan perundangan yang mereka jadikan acuan, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., kemudian dari aspek pola rekrutmen secara umum yang mereka jalankan, kegiatan evaluasi yang sama-sama dilakukan setiap hari dalam rapat harian, tidak ditentukannya secara mutlak presentase perbandingan caleg kader dan

non-kader, dan yang terakhir sama-sama mewajibkan caleg untuk mengikuti kaderisasi berjenjang.

2. Upaya PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatifnya.

Upaya PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatif khususnya calon anggota DPRD Provinsi, adalah dengan kaderisasi dan pemberian pendidikan politik bagi masyarakat. Kaderisasi merupakan usaha yang dilakukan partai politik untuk meningkatkan kualitas calon anggota dewan sehingga di masa yang akan datang penurunan kinerja anggota dewan dapat diminimalisir. Kaderisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi memerlukan waktu yang relatif lama karena terkait dengan penanaman ideologi partai dan loyalitas terhadap partai. DPW PAN dan DPD Gerindra sama-sama melakukan kaderisasi terkait dengan ketugasan dewan, nasionalisme, baik secara teknis maupun non-teknis untuk para kadernya. Hal ini bertujuan untuk melatih agar supaya mereka dapat bekerja maksimal dan dapat mengagregasi kepentingan publik secara baik. Selain itu, upaya yang DPW PAN dan DPD Gerindra lakukan untuk meningkatkan kualitas calegnya adalah dengan memberikan pendidikan politik, jika PAN dengan mendirikan sekolah politik KIBAR, sedangkan DPD Gerindra dengan melakukan berbagai kegiatan melalui sayap-sayap partai. Jika untuk masyarakat luas, pendidikan politik yang dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan bantuan politik dari

Kantor Kesbanglinmas (Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat).

3. Kesesuaian pola rekrutmen Partai Gerindra dan PAN dengan demokrasi prosedural.

Pola rekrutmen yang dilakukan oleh PAN dan Gerindra sudah sesuai dengan demokrasi prosedural. PAN dan Gerindra secara umum sama-sama menggunakan ketentuan persyaratan pendaftaran pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 51, dan memperhatikan serta melaksanakan presentase caleg perempuan minimal 30% sesuai dengan pasal 55 dan 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, meskipun terkait dengan sumber bacaleg yang mereka rekrut memiliki perbedaan yang cukup besar terkait dengan sumber caleg yang mereka rekrut. Partai Gerindra dan PAN memberikan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai caleg DPRD Provinsi tanpa membedakan ras, suku, gender, maupun agama. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar demokrasi prosedural yakni *political equality*.

## **B. Saran**

1. Bagi Partai Amanat Nasional (PAN)

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran terkait dengan pola rekrutmen yang PAN akan dilakukan selanjutnya, yakni:

- 1) Terkait dengan proses seleksi bakal calon anggota DPRD Provinsi, penggunaan *paper* sebagai materi skoring membuka kemungkinan untuk Bacaleg berbuat curang. Terdapat kemungkinan bacaleg tidak secara

mandiri membuat visi misi dalam bentuk paper tersebut. Akan lebih baik apabila ditambah dengan menggunakan test seperti wawancara terkait dengan nasionalisme, dan pelatihan pemecahan suatu masalah publik sehingga bacaleg akan terlatih untuk menemukan berbagai solusi sehingga saat ia terpilih menjadi anggota dewan nanti ia akan secara tepat mengatasi berbagai permasalahan dan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

- 2) Terkait dengan media sosialisasi yang digunakan untuk merekrut bakal calon anggota DPRD Provinsi akan lebih baik jika diperluas dan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga masyarakat dapat secara mudah mengetahui dan mempersiapkan berbagai hal terkait dengan pencalonannya. Penggunaan media sosial, seperti facebook, twitter, blog, website, dan lain sebagainya dirasa cukup baik sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat luas.
- 3) Terkait dengan posisi caleg perempuan, melihat fakta bahwa PAN terkadang mengalami kekurangan jumlah caleg perempuannya, sehingga biasanya partai melakukan rekrutmen tertutup dengan memposisikan caleg perempuan tersebut di posisi caleg yang tidak *fight*, atau hanya sebatas pemenuhan undang-undang saja. Sudah seharusnya PAN melakukan upaya yang lebih serius untuk memberdayakan caleg-caleg perempuannya, semisal dengan melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi pemberdayaan perempuan, atau mengadakan *workshop* terkait dengan pentingnya peran perempuan dalam pemerintahan saat ini sehingga

diharapkan aktivis-aktivis perempuan yang kompeten dapat secara penuh berjuang dalam pileg tahun-tahun berikutnya.

## 2. Bagi Partai Gerindra

Secara umum rekrutmen DPD Gerindra DIY sudah cukup baik, akan tetapi ada catatan bagi partai Gerindra:

- 1) Terkait dengan kaderisasi, mungkin akan lebih baik jika pelatihan ketugasan dewan terkait dengan tiga fungsi pokok lembaga legislatif lebih ditekankan, misalkan dengan pelatihan *budgeting*, pelatihan pembuatan perda, kemudian analisis kebijakan-kebijakan yang pro rakyat meskipun hanya dilakukan secara simulasi.
- 2) Terkait dengan syarat bacaleg, akan lebih baik apabila bacaleg juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan daftar kekayaannya untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi. Akan lebih baik apabila partai mengetahui secara jelas tentang penghasilan bacalegnya termasuk juga latar belakang dan motivasinya menjadi caleg karena memang bacaleg di partai Gerindra melibatkan orang-orang baru dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Selain itu, akan lebih baik apabila saat pendaftaran bacaleg juga turut melampirkan riwayat organisasi bacaleg sehingga dapat digunakan sebagai poin tambahan bacaleg untuk lolos seleksi menjadi caleg partai Gerindra.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: “*Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*” yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta antara Partai Gerindra dengan PAN.

Ada beberapa perbedaan pokok pola rekrutmen calon legislatif DPRD partai Gerindra dan PAN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. Pada PAN seleksi awal Bacaleg setelah pendaftaran yaitu menggunakan strategi pembuatan visi misi berwujud *paper* oleh Bacaleg dengan menurunkan *platform* partai. Kemudian kriteria penilaian paper digunakan untuk menyatakan Bacaleg tersebut lolos atau tidak menjadi DCS (Daftar Calon Sementara), sedangkan di partai Gerindra seleksi awal menggunakan test kegerindraan, wawancara umum tentang ketugasan dewan, dan tes psikologis.
- b. Untuk penggunaan media sosialisasi eksternal, PAN menggunakan pamflet dan edaran pengumuman untuk masyarakat yang ditempel di kantor DPW PAN DIY dan beberapa tempat lain, sedangkan untuk partai Gerindra menggunakan website resmi partai Gerindra di



<http://partaigerindra.or.id>. Selain menggunakan website resmi, mereka juga membuka pengumuman di media massa cetak maupun elektronik.

- c. PAN hanya merekrut Bacaleg kader, karena bacaleg PAN haruslah terlebih dahulu mengadakan kerjasama dan turut mendukung kemenangan partai dalam waktu yang relatif lama (dengan kata lain harus menjadi kader partai terlebih dahulu). Sedangkan partai Gerindra merekrut Bacaleg baik kader maupun non-kader, Bacaleg non-kader (tokoh masyarakat) boleh berasal dari orang yang sebelumnya belum pernah mengadakan kerjasama dengan partai Gerindra, asalkan memang Bacaleg memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap partai.
- d. Posisi caleg perempuan di Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki prioritas berada di nomor urut satu jika ia didukung oleh perannya sebagai kader partai, jika tidak maka tetap berdasarkan skoring yang didapatkan caleg. Pada partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki.

Selain berbagai perbedaan diatas, terdapat pula beberapa persamaan dari pola rekrutmen yang digunakan. Persamaan tersebut ada pada aspek peraturan perundangan yang mereka jadikan acuan, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., kemudian dari aspek pola rekrutmen secara umum yang mereka jalankan, kegiatan evaluasi yang sama-sama dilakukan setiap hari dalam rapat harian, tidak ditentukannya secara mutlak presentase perbandingan caleg kader dan

non-kader, dan yang terakhir sama-sama mewajibkan caleg untuk mengikuti kaderisasi berjenjang.

2. Upaya PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatifnya.

Upaya PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatif khususnya calon anggota DPRD Provinsi, adalah dengan kaderisasi dan pemberian pendidikan politik bagi masyarakat. Kaderisasi merupakan usaha yang dilakukan partai politik untuk meningkatkan kualitas calon anggota dewan sehingga di masa yang akan datang penurunan kinerja anggota dewan dapat diminimalisir. Kaderisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi memerlukan waktu yang relatif lama karena terkait dengan penanaman ideologi partai dan loyalitas terhadap partai. DPW PAN dan DPD Gerindra sama-sama melakukan kaderisasi terkait dengan ketugasan dewan, nasionalisme, baik secara teknis maupun non-teknis untuk para kadernya. Hal ini bertujuan untuk melatih agar supaya mereka dapat bekerja maksimal dan dapat mengagregasi kepentingan publik secara baik. Selain itu, upaya yang DPW PAN dan DPD Gerindra lakukan untuk meningkatkan kualitas calegnya adalah dengan memberikan pendidikan politik, jika PAN dengan mendirikan sekolah politik KIBAR, sedangkan DPD Gerindra dengan melakukan berbagai kegiatan melalui sayap-sayap partai. Jika untuk masyarakat luas, pendidikan politik yang dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan bantuan politik dari

Kantor Kesbanglinmas (Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat).

3. Kesesuaian pola rekrutmen Partai Gerindra dan PAN dengan demokrasi prosedural.

Pola rekrutmen yang dilakukan oleh PAN dan Gerindra sudah sesuai dengan demokrasi prosedural. PAN dan Gerindra secara umum sama-sama menggunakan ketentuan persyaratan pendaftaran pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 51, dan memperhatikan serta melaksanakan presentase caleg perempuan minimal 30% sesuai dengan pasal 55 dan 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, meskipun terkait dengan sumber bacaleg yang mereka rekrut memiliki perbedaan yang cukup besar terkait dengan sumber caleg yang mereka rekrut. Partai Gerindra dan PAN memberikan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai caleg DPRD Provinsi tanpa membedakan ras, suku, gender, maupun agama. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar demokrasi prosedural yakni *political equality*.

## **B. Saran**

1. Bagi Partai Amanat Nasional (PAN)

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran terkait dengan pola rekrutmen yang PAN akan dilakukan selanjutnya, yakni:

- 1) Terkait dengan proses seleksi bakal calon anggota DPRD Provinsi, penggunaan *paper* sebagai materi skoring membuka kemungkinan untuk Bacaleg berbuat curang. Terdapat kemungkinan bacaleg tidak secara

mandiri membuat visi misi dalam bentuk paper tersebut. Akan lebih baik apabila ditambah dengan menggunakan test seperti wawancara terkait dengan nasionalisme, dan pelatihan pemecahan suatu masalah publik sehingga bacaleg akan terlatih untuk menemukan berbagai solusi sehingga saat ia terpilih menjadi anggota dewan nanti ia akan secara tepat mengatasi berbagai permasalahan dan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

- 2) Terkait dengan media sosialisasi yang digunakan untuk merekrut bakal calon anggota DPRD Provinsi akan lebih baik jika diperluas dan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga masyarakat dapat secara mudah mengetahui dan mempersiapkan berbagai hal terkait dengan pencalonannya. Penggunaan media sosial, seperti facebook, twitter, blog, website, dan lain sebagainya dirasa cukup baik sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat luas.
- 3) Terkait dengan posisi caleg perempuan, melihat fakta bahwa PAN terkadang mengalami kekurangan jumlah caleg perempuannya, sehingga biasanya partai melakukan rekrutmen tertutup dengan memposisikan caleg perempuan tersebut di posisi caleg yang tidak *fight*, atau hanya sebatas pemenuhan undang-undang saja. Sudah seharusnya PAN melakukan upaya yang lebih serius untuk memberdayakan caleg-caleg perempuannya, semisal dengan melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi pemberdayaan perempuan, atau mengadakan *workshop* terkait dengan pentingnya peran perempuan dalam pemerintahan saat ini sehingga

diharapkan aktivis-aktivis perempuan yang kompeten dapat secara penuh berjuang dalam pileg tahun-tahun berikutnya.

## 2. Bagi Partai Gerindra

Secara umum rekrutmen DPD Gerindra DIY sudah cukup baik, akan tetapi ada catatan bagi partai Gerindra:

- 1) Terkait dengan kaderisasi, mungkin akan lebih baik jika pelatihan ketugasan dewan terkait dengan tiga fungsi pokok lembaga legislatif lebih ditekankan, misalkan dengan pelatihan *budgeting*, pelatihan pembuatan perda, kemudian analisis kebijakan-kebijakan yang pro rakyat meskipun hanya dilakukan secara simulasi.
- 2) Terkait dengan syarat bacaleg, akan lebih baik apabila bacaleg juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan daftar kekayaannya untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi. Akan lebih baik apabila partai mengetahui secara jelas tentang penghasilan bacalegnya termasuk juga latar belakang dan motivasinya menjadi caleg karena memang bacaleg di partai Gerindra melibatkan orang-orang baru dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Selain itu, akan lebih baik apabila saat pendaftaran bacaleg juga turut melampirkan riwayat organisasi bacaleg sehingga dapat digunakan sebagai poin tambahan bacaleg untuk lolos seleksi menjadi caleg partai Gerindra.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Any Rohyati. dkk. 2006. *Pilkada dan Pengembang Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: KPU Provinsi DIY
- Bambang Cipto. 2000. *Partai, Kekuasaan, dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cheppy Haricahyono. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana
- H. Mangkubumi. 1989. *Kerangka dan Konsepsi Politik Indonesia: Sebuah Tinjauan dan Analisa Perkembangan Politik Nasional Indonesia*. Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya
- Hafied Cangara. 2011. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ichlasul Amal. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Edisi Pertama*. Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya
- \_\_\_\_\_. 2012. *Teori-Teori Partai Politik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Joko Siswanto. 2006. *Reaksi Intelektualitas Untuk Demokratisasi*. Palembang: Yayasan Bakti Nusantara
- Lexy J. Moloeng. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- M. Ali Syafa'at. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miriam Budiardjo. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mohammad Najib. 2005. *Masyarakat Bertanya KPU DIY Menjawab*. Yogyakarta: KPU DIY
- Ramlan Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Rusadi Kantaprawira. 1977. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Tribisana Karya

Rush, Michael & Phillip Althoff. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Alih bahasa: Dr. Kartini Kartono). Jakarta: Rajagrafindo Persada

Siti Zuhro, dkk. 2009. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta

Sumadi Suyabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-undang Tentang Partai Politik:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Jurnal:**

Sunarso. 2008. Demokrasi di Indonesia: Konsep, Transisi, dan Implementasinya. *Jurnal Civics* (Vol.5, No.2). Hlm. 8-15

Djihad Hisyam. Demokrasi Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal SOCIA* (Vol. 1, No.2). Hlm. 4-5

#### **Internet:**

<http://partaigerindra.or.id> diakses tanggal 24 April 2014

<http://www.harianjogja.com/baca/2014/06/26/kinerja-anggota-dprd-masa-transisi-begini-kinerja-anggota-dprd-diy-515663> diakses tanggal 31 Juli 2014

<http://posbali.com/prabowo-effect-lonjakkan-suara-gerindra-jokowi-terancam/> diakses tanggal 15 April 2014

**Lampiran 1:**

**DAFTAR CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DIY  
PARTAI GERINDRA TAHUN 2014-2019**

<b>No</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Jenis Kelamin (L/P)</b>	<b>Alamat</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Dapil</b>
1.	Septo Hartono, SE	L	Gadingan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman	Sarjana (S1)	Gunung Kidul
2.	H. Setyo Wibowo, SE	L	Bansari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul	Sarjana (S1)	Gunung Kidul
3.	Bray. Iriani Pramastuti	P	Puro Pakualaman, Purwokinanti, Yogyakarta	SMA	Gunung Kidul
4.	Krisnadi Setiawan	L	Rotowijayan, Kadipaten, Yogyakarta	SMA	Gunung Kidul
5.	Solikatun Aslamiah, SE	P	Karangduwet, Gunungkidul	Sarjana (S1)	Gunung Kidul
6.	Cahyadi Sunarno	L	Giriharjo, Panggang, Gunungkidul	SMA	Gunung Kidul
7.	Rr. Enny Asmawati, SH	P	Jl. Munggur, Demangan, Yogyakarta	Sarjana (S1)	Gunung Kidul
8.	Puji Raharjo	L	Pogung Lor, Sinduhadi, Mlati, Sleman	SMA	Gunung Kidul
9.	Rini Widiastuti, S.Sn,	P	Karangtengah,	Magister	Gunung



	M.Hum		Gunungkidul	(S2)	Kidul
10.	Sayun	L	Klegen, Trimulyo,, Sleman	SMA	Sleman Utara
11.	Suroyo	L	Cepit, Harjobinangun, Sleman	SMA	Sleman Utara
12.	Imelda Erlin Ariestyowati	P	Griya Purwa Asri, Purwomartani, Kalasan, Sleman	SMA	Sleman Utara
13.	Tony Suryanta, SH	L	Kali Jeruk II, Widomartani, Ngemplak, Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Utara
14.	Kartika Maharani	P	Karang Kalasan, Tirtomartani, Sleman	SMA	Sleman Utara
15.	Ir. Jacky Latupeirissa, MA	L	Perum T. Cendrawasih, Sariharjo, Ngaglik, Sleman	Magister (S2)	Sleman Utara
16.	Sulistyandari, S.Pd.	P	Kaliwanglu Wetan, Harjobinangun, Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Utara
17.	Yohannes Budi Mulyono	L	Donokerto, Turi, Sleman	SMA	Sleman Utara
18.	Dharma Setiawan	L	Perum Cassa Grande, Maguwoharjo	SMA	Sleman Selatan

			Depok, Sleman		
19.	Robert Silvanus Dendeng	L	Kricak Kidul, Tegalrejo, Yogyakarta	SMA	Sleman Selatan
20.	Indri Yuni Diah Setyowati, SE	P	Jl. Balirejo Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
21.	Daniel Damaledo	L	Jl. Adisucipto Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman	SMA	Sleman Selatan
22.	Yustiwi, SP	P	Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
23.	Sekarlangit Saptohoedojo	L	Jl. Solo Km.9 Tlukan, Maguwoharjo, Sleman	SMA	Sleman Selatan
24.	Yuliana	P	Sendowo, Sinduadi, Mlati, Sleman	SMA	Sleman Selatan
25.	Drs. R. Widi Handoko	L	Karangasem Baru CT X, Caturtunggal, Depok, Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
26.	Sodiqul Qiyar	L	Gamping Kidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman	SMA	Sleman Selatan
27.	Heri Sumardiyanta	L	Dipan Wates,	SMA	Sleman

			Kulonprogo		Selatan
28.	Drs. HR. Mulyono, MAP	L	Kedungpring, Wates, Kulonprogo	Magister (S2)	Sleman Selatan
29.	Dra. H. Endang Edi Astuti	P	Perumnas CC Gempol, Condongcatur, Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
30.	Albani	L	Jetak, Kaliagung Sentolo, Kulonprogo	SMA	Sleman Selatan
31.	Rr. Esti Inti Asih	P	Wora Wari, Sentolo, Kulonprogo	SMA	Sleman Selatan
32.	Krisni Ratna Kusuma	P	Sidoharjo, Samigaluh Kulonprogo	SMA	Sleman Selatan
33.	Suwito, SH	L	Gunung Gempal, Wates, Kulonprogo	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
34.	Ir. Agung Britantono	L	Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Sarjana (S1)	Bantul Barat
35.	Gunawan, SH	L	Pendowoharjo, Sewon, Bantul	Sarjana (S1)	Bantul Barat
36.	Tri Wahyuni, A.Md	P	Argodadi, Sedayu	Diploma (D3)	Bantul Barat
37.	Sri Lestari	P	Banyuraden, Gamping, Sleman	SMA	Bantul Barat
38.	M. Pranasik Faihaan	L	Iroyudan, Guwosari,	SMA	Bantul Barat

			Pajangan, Bantul		
39.	Danang Wahyu Broto, SE, MSi	L	Rotowijayan, Kadipaten, Yogyakarta	Magister (S2)	Bantul Barat
40.	H. Yoserizal, SH	L	Semaki, Yogyakarta	Sarjana (S1)	Bantul Timur
41.	Ani Listyawati, SH	P	Sorogenen, Sewon	Sarjana (S1)	Bantul Timur
42.	MM. Kristyanti Arry Wardhani	P	Sorowajan, Banguntapan, Bantul	SMA	Bantul Timur
43.	Arum Kusumaningtyas	P	Demblak Sari, Banguntapan, Bantul	SMA	Bantul Timur
44.	Subarja	L	Donotirto, Kretek, Bantul	SMA	Bantul Timur
45.	Edhie Wibowo	L	Singosaren Utara, Pakuncen Yogyakarta	SMA	Bantul Timur
46.	Anton Prabu Semendawai, SH	L	Jl. Sidokabul, Sorosutan	Sarjana (S1)	Kota Yogyakarta
47.	Oni Wantara, SE	L	Kadipaten Kidul, Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kota Yogyakarta
48.	Hj. Susie Fitri Hendriarti, SH, MH, MM	P	Banyuraden, Gamping, Sleman	Magister (S2)	Kota Yogyakarta
49.	Andreas Budisusetia, SE. MH	L	Gowongan Kidul, Yogyakarta	Magister (S2)	Kota Yogyakarta
50.	Ilma Fatimah Yusuf	P	Baciro, Yogyakarta	SMA	Kota Yogyakarta

51.	Sri Wahyuni Lestari Kusumah	P	Kotabaru, Yogyakarta	SMA	Kota Yogyakarta
52.	RM. Sinarbiyatnujanat, SE	L	Pugeran Timur, Suryodiningratan, Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kota Yogyakarta
53.	Subirman	L	Watu Gajah, Gunungkidul	SMA	Kota Yogyakarta
54.	Andaru Bramono	L	Kotabaru, Yogyakarta	SMA	Kota Yogyakarta

*Sumber: DPD Gerindra DIY, diolah pada bulan Maret, 2014*

**Lampiran 2:**

**DAFTAR CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DIY  
PARTAI AMANAT NASIONAL TAHUN 2014-2019**

<b>No</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Jenis Kelamin (L/P)</b>	<b>Alamat</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Dapil</b>
1.	Arif Noor Hartanto, SIP	L	Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kota Yogyakarta
2.	Arnabun, SE, MM	P	Komplek Batan Banguntapan Bantul	Magister	Kota Yogyakarta
3.	Siti Muslikhatun, SH	P	Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kota Yogyakarta
4.	Drs. A. Hazairien Oeza	L	Klitren Gondokusuman Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kota Yogyakarta
5.	Iriawan Argo Widodo, SIP	L	Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kota Yogyakarta
6.	Rini Novi Astuti, SH	P	Basen Purbayan Kotagede Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kota Yogyakarta
7.	Agung Nugroho	L	Prenggan Kotagede Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kota Yogyakarta
8.	Suharwanta, ST	L	Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Sarjana (S1)	Bantul Timur

9.	Rustam Fatoni, S.Pd	L	Jambidan Banguntapan Bantul	Sarjana (S1)	Bantul Timur
10.	Amin Budiati, S.Pd.I	P	Bawuran Pleret Bantul	Sarjana (S1)	Bantul Timur
11.	Rusliyanti	P	Gilangharjo Pandak Bantul	SMEA	Bantul Timur
12.	Inggit Fandayati, SS	P	Gayam Jatimulyo Dlingo Bantul	Sarjana (S1)	Bantul Timur
13.	Ridwan Sudiyanto	L	Poncosari Srandakan Bantul	SMK	Bantul Timur
14.	Suharyani	P	Pranti Srihardono Pundong Bantul	SMK	Bantul Timur
15.	Paryanto, S.Ag	L	Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Sarjana (S1)	Bantul Barat
16.	Ir. Atmaji	L	Sabdodadi, Bantul	Sarjana (S1)	Bantul Barat
17.	Andarti Pujiastuti, SE	P	Brajan Tamantirto Kasihani Bantul	Sarjana (S1)	Bantul Barat
18.	Fani Satria	L	Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta	SMA	Bantul Barat
19.	Amaliya Hasanatun	P	Tirtomulyo Kretek Bantul	MAN	Bantul Barat
20.	M. Gondo Ratangin	L	Mergangsan	Magister	Bantul Barat

			Yogyakarta	(S2)	
21.	Ir. Hamam Mutaqim	L	Wonosidi Lor Wates, Kulon Progo	Sarjana (S1)	Kab Kulon Progo
22.	Sudarto	L	Wijimulyo Nanggulan Kulon Progo	STM	Kab Kulon Progo
23.	Wahyu Bawaningsih	P	Giripeni, Wates, Kulon Progo	SMEA	Kab Kulon Progo
24.	Gunawan, S.Si	L	Sendangsari Pengasih Kulon Progo	Sarjana (S1)	Kab Kulon Progo
25.	Linda Wahyu Susanti, SE	P	Panggang Bumirejo Lendah Kulon Progo	Sarjana (S1)	Kab Kulon Progo
26.	Nurul Azizah, ST	P	Giwangan Umbulharjo Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kab Kulon Progo
27.	Drs. Kasdiyono	L	Sukoreno Sentolo Kulon Progo	Sarjana (S1)	Kab Kulon Progo
28.	Sadar Narima, S.Ag, SH	L	Sumberarum Moyudan Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
29.	Rr. Herien Suminaryati	P	Ngestiharjo Kasihan, Bantul	SMEA	Sleman Selatan
30.	Arief Hartanto	L	Sidoharjo Bangunkerto Turi Sleman	SMA	Sleman Selatan



31.	Drs. Muh. Nurrochid	L	Caturtunggal Depok Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
32.	Febriana Mustikaningrum, ST	P	Maguwoharjo Depok Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
33.	Imam Sujangi, S.Si, Apt	L	Mlati Botoijan Sendangadi Mlati Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
34.	Emi Rahmawati	P	Kadisono Tegaltirto Berbah Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Selatan
35.	Agus Sriyanto, A.Md	L	Bodeh Ambarketawang Gamping Sleman	Akademi	Sleman Selatan
36.	Dita Kusumaningrum	P	Jl. Timoho, Caturtunggal Depok Sleman	MA	Sleman Selatan
37.	Dra. Marthia Adelheida	P	Minomartani, Ngaglik, Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Utara
38.	Ir. Rohman Agus Sukamta	L	Margorejo Tempel Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Utara
39.	Fifit Isnafiyah, M.Si	P	Purwomartani Kalasan Sleman	Magister (S2)	Sleman Utara
40.	Ir. Achmad Yulianto	L	Jl. Pekapalan, Alun-alun Utara Yogyakarta	Sarjana (S1)	Sleman Utara
41.	Yogi Jatmikanto, SIP	L	Jl. Mondorakan, Kotagede Yogyakarta	Sarjana (S1)	Sleman Utara
42.	Dyah Noviati, SE	P	Condongcatur	Sarjana (S1)	Sleman Utara

			Depok Sleman		
43.	Ratna Sari Dewi, S.Pd	P	Bonyokan Jatinom Klaten Jawa Tengah	Sarjana (S1)	Sleman Utara
44.	Niko Agung Kuncoro	L	Bulaksumur, Depok Sleman	Sarjana (S1)	Sleman Utara
45.	Tutiek Masria Widyono, SE	P	Jetis, Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kab Gunungkidul
46.	Drs. Sutata	L	Kepek, Wonosari Gunungkidul	Sarjana (S1)	Kab Gunungkidul
47.	Arif Setiadi, SIP	L	Kedungpoh Nglipar Gunungkidul	Sarjana (S1)	Kab Gunungkidul
48.	Rohadi, S.Pd	L	Plesedan Srimulyo Piyungan Bantul	Sarjana (S1)	Kab Gunungkidul
49.	M. Yogandha Tyasmoko	L	Kepek Wonosari Gunungkidul	SMA	Kab Gunungkidul
50.	Sukasmirah	P	Kemorosari I Piyaman Wonosari Gunungkidul	SMA	Kab Gunungkidul
51.	Pugud Agil Ardina, S.Psi	L	Ngringin Jatiayu Karangmojo Gunungkidul	Sarjana (S1)	Kab Gunungkidul
52.	Warni	P	Kepuhsari Katongan Nglipar Gunungkidul	SPG	Kab Gunungkidul

53.	Tri Irawati, SE, M.Si	P	Griya Serba Asri, Surakarta	Magister (S2)	Kab Gunungkidul
54.	Siti Wijayanti	P	Jl. Baron km.17 Tenggang Tanjungsari Gunungkidul	SMA	Kab Gunungkidul
55.	Shanti Wibowo, SE	L	Bausasran Danurejan Yogyakarta	Sarjana (S1)	Kab Gunungkidul

*Sumber: DPW PAN DIY diolah pada bulan Maret, 2014*

**Lampiran 3:**

**DAFTAR ANGGOTA DPRD (PROVINSI) TERPILIH PARTAI AMANAT  
NASIONAL TAHUN 2014-2019**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jabatan struktural</b>
1.	Arif Noor Hartanto, S.I.P.	Kotagede, Yogyakarta	Sarjana FISIPOL UGM	Wakil Sekretaris DPW PAN DIY
2.	Suharwanta, ST	Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta	Sarjana Teknik Sipil UII	Wakil Ketua DPW PAN DIY
3.	Ir. Atmaji	Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta	Sarjana Kimia Teknik UGM	Wakil Sekretaris DPW PAN DIY
4.	Ir. Hamam Mutaqim	Wates, Kulonprogo, Yogyakarta	Sarjana Teknik Sipil UMY	Ketua DPD PAN Kulonprogo
5.	Sadar Narima, S.Ag., S.H.	Moyudan, Sleman, Yogyakarta	Sarjana Hukum UGM	Sekretaris DPD PAN Sleman
6.	Dra. Marthia Adelheida	Ngaglik, Sleman, Yogyakarta	Sarjana FISIPOL UGM	Ketua DPD PAN Sleman
7.	Drs. Sutata	Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta	Sarjana IKIP Muhammadiyah Yogyakarta	Sekretaris DPW PAN DIY
8.	Arif Setiadi, S.I.P.	Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta	Sarjana FISIPOL UGM	Wakil Ketua DPD PAN Gunungkidul

*Sumber: DPW PAN DIY diolah pada bulan Juni, 2014*

*Lampiran 3: (Lanjutan)*

**DAFTAR ANGGOTA DPRD (PROVINSI) TERPILIH PARTAI GERAKAN  
INDONESIA RAYA (GERINDRA) TAHUN 2014-2019**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jabatan Struktural</b>
1.	Anton Prabu Semendawai, SH	Sorosutan, Umbulharjo	Sarjana	Ketua DPC Gerindra Kota Yogyakarta
2.	Yoserizal, SH	Semaki, Yogyakarta	Sarjana	Anggota Dewan Penasehat DPD Gerindra DIY
3.	Danang Wahyu Broto, SE, MSi	Kadipaten, Kraton Yogyakarta	Magister	Wakil Ketua DPD Gerindra DIY
4.	Hery Sumardiyanta	Wates, Kulonprogo	SMA	Ketua DPC Gerindra Kab. Kulonprogo
5.	Dharma Setiawan	Maguwoharjo, Depok, Sleman	SMA	Sekretaris DPD Gerindra DIY
6.	Suroyo	Harjobinangun, Pakem, Sleman	SMA	Wakil Ketua DPD Gerindra DIY
7.	Setyo Wibowo, SE	Kepek, Wonosari, Gunungkidul	Sarjana	-

*Sumber: DPD Gerindra DIY diolah pada bulan Juni, 2014*